

RENJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025



DINAS PU BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Semarang, 12 September 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah



Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661129 199203 1 005

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Renja PD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) di tiap tahun selama 5 (lima) tahun. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan transisi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta Proyek Strategis Nasional (Perpres Nomor 109 Tahun 2020).

Penyusunan Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses Penyusunan Renja PD Tahun 2025 meliputi:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 20 Maret 2024 untuk mendapatkan masukan, usulan, dan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah di Jawa Tengah. Dalam forum ini pemangku kepentingan melakukan penajaman target kinerja sasaran, sasaran, program dan kegiatan dalam rancangan Renja PD dengan tujuan menyelaraskan program dan kegiatan antar PD, nasional dan kabupaten/kota.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja PD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
6. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dimutakhirkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708/2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri PAN dan RB PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Pentunjuk Penyusunan IKU;
25. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
27. Perda Jateng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
28. Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
29. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan;
30. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
31. Perda Jateng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
35. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.11/0000042 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Renstra PD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026; dan

36. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 000.7/0001788 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya menyusun Renja Perangkat Daerah memiliki maksud:

- a. Menjabarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2025;
- b. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan peran visi, misi, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dalam jangka menengah atau 3 (tiga) tahun periode pembangunan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya menyusun Renja Perangkat Daerah memiliki tujuan sebagai:

- a. Pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. Pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- c. Pedoman pelayanan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan Renja PD tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD Tahun 2018-2023 untuk evaluasi Renja PD Tahun 2023 dan Renstra PD Tahun 2024-2024 untuk prakiraan capaian tahun 2024. Reviu hasil evaluasi, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional, perumusan tujuan dan sasaran Renja PD, serta manajemen risiko yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Subbab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2025 sesuai dengan yang tertuang dalam eplanning.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun 2023. Pada tahun 2023, terdapat 89 indikator Program/Kegiatan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

a. 6 indikator program/kegiatan yang realisasinya tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal;
2. Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap;
3. Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang;
4. Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang;
5. Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati;
6. Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta.

b. 72 indikator program/kegiatan yang realisasinya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

c. 11 indikator program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer);
2. Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer);
3. Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur;
4. Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer);
5. Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer);
6. Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan;
7. Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo;

8. Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi;
9. Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi;
10. Persentase akses sanitasi air limbah domestik;
11. Persentase akses aman air minum perdesaan; dan

d. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan indikator tersebut memenuhi target dan melebihi target antara lain :

a. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan:

- 1.) Kegiatan sudah direncanakan dengan baik;
- 2.) Waktu pelaksanaan selalu terkontrol dengan baik;
- 3.) Proses pengadaan sesuai dengan tatakala yang telah ditetapkan (tepat waktu).

b. Faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan adalah:

- 1.) Bertambahnya panjang penanganan menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan lapangan;
- 2.) Meningkatnya minat penduduk untuk memperoleh akses air minum;
- 3.) Adanya Program Hibah Jalan Daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang;
- 4.) Meningkatnya pelaku jasa konstruksi dalam pengendalian mutu pekerjaan konstruksi melalui pengujian laboratorium yang terakreditasi.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja

c. program/kegiatan adalah:

- 1.) Curah hujan yang tinggi di akhir tahun menyebabkan penurunan kondisi permukaan jalan.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD antara lain :

- a. Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor;
- b. Kondisi permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan baik;
- c. Meningkatnya akses aman air minum bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat;
- d. Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah dan kompetensi tenaga kerja;

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan adalah peningkatan keselarasan proses perencanaan, kondisi lapangan, dan penganggaran. Sedangkan untuk target yang tidak tercapai kebijakan/tindakan yang dilakukan adalah dengan merencanakan optimalisasi pekerjaan pemeliharaan rutin jalan pada lokasi kondisi jalan rusak ringan (kondisi tidak mantap) sehingga menjadi kondisi sedang (kondisi mantap).

Hasil revidu tersebut dituangkan dalam tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya dan Pencapaian Renstra Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya s/d Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah berikut.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya dan Pencapaian Renstra
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya s/d Tahun 2023
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penyelenggaraan	Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan	%	100	100	100	100	100	-	-	-
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan	DOK	3	3	3	3	100	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Penyelenggaraan	Persentase panjang jalan yang dileger	%	100	99,71	100	100	100	75,79	75,79	75,79
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang dileger	KM	2.404,63	2.397,66	2.404,74	2.404,74	100	1.386,03	1.386,03	57,64
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase perencanaan, pengawasan, dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	83,33	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	DOK	4	8	5	5	100	8	8	200
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan	DOK	10	10	4	4	100	13	13	130
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	luas lahan yang dibebaskan	M2	100	3.280,00	5.010,00	5.010,00	100	5.218,00	5.218,00	5.218,00
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	44,34	46,32	48,01	48,01	100	41,68	41,68	94

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer)	KM	2	6,3	2,1	5,59	266,19	7,09	7,09	354,5

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer)	KM	4	16,68	4,8	12,86	267,92	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	39,89	40,78	42,42	42,55	100,31	47,5	47,5	119,07

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer)	KM	6,5	17,69	4,16	6,42	154,33	5	5	76,92

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer)	KM	5,6	5,88	2	2,27	113,5	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%	91,43	89,23	95,02	91,64	96,44	89,43	89,43	97,81
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1	KM	75,6	99,52	118,1	118,1	100	206,24	206,24	272,8

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 – 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2	KM	73,98	73,41	70,3	70,3	100	-	-	-
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	%	82,43	81,74	83,6	83,6	100	83,65	83,65	101,48

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1	M	856	1.226,22	1.226,22	1.226,22	100	2.871,82	2.871,82	335,49
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2	M	1059,35	1.059,35	1.079,35	1.079,35	100	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%	92,12	93,01	97,16	95,32	98,11	94,17	94,17	102,22
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1	KM	120,82	63,05	100,19	100,19	100	261,08	261,08	216,09

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2	KM	170,85	186,46	178,07	178,07	100	-	-	-
9	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang	%	92,61	91,89	93,6	93,6	100	93,65	93,65	101,12

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1	M	694,15	482,6	482,6	482,6	100	2.164,80	2.164,80	311,86
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2	M	1427,35	1.904,05	1.904,05	1.904,05	100	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	87,94	97,69	91,32	86,77	95,02	88,12	88,12	100,2
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1	KM	126,33	144,3	83,84	83,84	100	249,26	249,26	197,3

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2	KM	140,93	121,6	121,05	121,05	100	-	-	-
11	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	%	92,4	91,49	93,77	93,77	100	93,82	93,82	101,53

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1	M	1188	1.232,70	1.252	1.252	100	2.482,95	2.482,95	209
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2	M	1477,05	1.439,05	1.432,95	1.432,95	100	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	96,19	96,05	85,27	90,03	105,58	85,23	85,23	88,61
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1	KM	157,9	157,9	158,9	158,9	100	254,16	254,16	160,96

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2	KM	92,67	90,67	91,36	91,36	100	-	-	-
13	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	86,99	86,07	88,44	88,44	100	88,49	88,49	101,72

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1	M	1598,6	1.598	1.601,60	1.601,60	100	2.905,02	2.905,02	181,72
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2	M	1100,9	1.138,30	1.349,90	1.349,90	100	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	84,21	84,87	88,57	88,48	99,9	86,78	86,78	103,05
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1	KM	187,26	184,53	173,78	173,78	100	379,69	379,69	202,76

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2	KM	194,86	191,9	176,34	176,34	100	-	-	-
15	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	90,02	88,82	91,13	91,13	100	91,18	91,18	101,28

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1	M	1866,5	1.958,70	1.958,70	1.958,70	100	3.682,18	3.682,18	213,35
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2	M	1662,4	1.688,80	1.648,80	1.648,80	100	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	%	97,71	98,69	99,99	92,31	92,32	99,95	99,95	102,29
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1	KM	135,18	134,13	134,14	134,14	100	220,38	220,38	163,02

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2	KM	87,48	87,45	85,91	85,91	100	-	-	-
17	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	%	84,8	84,13	85,46	85,46	100	85,51	85,51	100,83

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1	M	1308,5	1.306,80	1.316,80	1.316,80	100	1.781,95	1.781,95	136,18
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2	M	723,9	729	729	729	100	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	%	94,15	96,5	91,83	90,82	98,9	93,17	93,17	98,95
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1	KM	191,04	188,89	190,84	190,84	100	410,11	410,11	214,67

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2	KM	231,59	233,99	231,13	231,13	100	-	-	-
19	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	%	94,19	92,66	94,73	94,73	100	94,78	94,78	100,62

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1	M	1165,1	1.266,50	1.078,20	1.078,20	100	4942,6	4942,6	424,22
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2	M	3265,2	3.282,20	3.282,20	3.282,20	100	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	%	88,02	93,63	95,73	93,48	97,65	95,52	95,52	108,52
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1	KM	86,97	85,97	86,51	86,51	100	201,84	201,84	232,08

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2	KM	97,72	97,87	94,9	94,9	100	-	-	-
21	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	%	84,92	84,24	86,09	86,09	100	86,14	86,14	101,43

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1	M	771,4	774,4	780,4	780,4	100	2.037,00	2.037,00	264,06
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2	M	1231,3	1.236	1.243,00	1.243,00	100	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	97,43	83,33	90,16	91,87	101,9	91,61	91,61	94,02
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1	KM	140,94	127,6	124,42	124,42	100	248,56	248,56	176,35

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2	KM	109,16	44,29	46,45	46,45	100	-	-	-
23	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	93,7	92,92	94,85	94,85	100	94,9	94,9	101,28

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1	M	1396,5	1.373,20	1.384,00	1.384,00	100	2.092,57	2.092,57	149,84
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2	M	792,5	371,1	375,2	375,2	100	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 – 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	%	100	85,33	100	100	100	12,85	12,85	12,85
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah peralatan kebinamargaan yang tersedia	UNIT	243	1.070,00	227	227	100	53	53	21,81
25	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	100	114,86	100	117,79	117,79	31,88	31,88	31,88

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi	SHU	1395	6.307,00	1.395,00	1.395,00	100	1.100,00	1.100,00	78,85
26	Penataan Bangunan Gedung	Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	100	14,21	15,23	15,23	100	5,83	5,83	5,83

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar (sampai dengan tahun n)	UNIT	147	146	11	11	100	60	60	40,81
27	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%	93,9	90,38	91,5	92,14	100,7	93,58	93,58	99,65

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani akses air limbah domestik	SR/KK	6.941.376,46	6.800.384,19	6.941.376,46	6.941.376,46	100	34.724.662	34.724.662	500,25
28	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase akses layak air minum perdesaan	%	83,3	84,08	83,3	84,22	101,1	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM perdesaan	KK	3.309.148,00	3.239.628	3.309.148	3.309.148	100	-	-	-
29	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase akses layak air minum perkotaan	%	94,15	92,45	94,15	94,15	100	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan rumah yang terlayani SPAM perkotaan	KK	2.957.458,00	2.894.633	2.957.458	2.957.458	100	-	-	-

30	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab./kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota	%	100	89,39	100	100	100	-	-	-
----	---	--	---	-----	-------	-----	-----	-----	---	---	---

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun	Liter/detik	100	1.179,00	1.319,00	1.319,00	100	-	-	-
31	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	100	100	100	100	100	45,38	45,38	45,38

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang ditingkatkan kapasitasnya	ORANG	540	540	540	540	100	320	320	59,25
32	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	19,09	16,54	19,09	19,09	100	43,49	43,49	227,81
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	ORANG	160	1.410	400	400	100	10.579,00	10.579,00	6.611,87

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah informasi jasa konstruksi	BUAH	3	3	3	3	100	5	5	166,66
33	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang diperiksa keandalannya	%	14,27	14,21	15,23	15,23	100	11,94	11,94	83,67

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komplek BGMD yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (sampai dengan tahun n)	UNIT	147	146	11	11	100	123	123	83,67

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase akses air minum layak	%	-	-	-	-	-	91,92	91,92	100
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Layak Th-N (Jiwa)	Orang	-	-	-	-	-	33.760.434	33.760.434	100

35	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	-	-	-	-	-	100	100	100
----	---	--	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota	Liter	-	-	-	-	-	20	20	100
36	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase akses air minum jaringan perpipaan	%	-	-	-	-	-	54,32	54,32	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018 – 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s./d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jiwa)	Orang	-	-	-	-	-	19.950.683	19.950.683	100

- Kolom (2), (3), dan (4) diisi dengan program, kegiatan beserta indikator kinerja dan satuannya sesuai dengan Renja PD Tahun 2023 (Perubahan);
- Kolom (5) diisi target kinerja akhir program dan kegiatan Tahun 2023 sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 (yang telah disesuaikan);
- Kolom (6) diisi dengan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022;
- Kolom (7) diisi target kinerja program dan kegiatan sesuai Renja PD Tahun 2023 (perubahan);
- Kolom (8) diisi dengan realisasi kinerja program dan kegiatan sesuai Renja PD Tahun 2023;
- Kolom (9) diisi dengan Tingkat ketercapaian realisasi kinerja program dan kegiatan (d disesuaikan dengan jenis indikator);
- Kolom (10) diisi dengan target kinerja program dan kegiatan dalam Renja PD Tahun 2024;
- Kolom (11) diisi dengan perkiraan Tingkat ketercapaian realisasi capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2024;
- Kolom (12) diisi dengan perkiraan Tingkat ketercapaian realisasi kinerja program dan kegiatan, dengan membandingkan target kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir kinerja Renstra PD Tahun 2024-2026, dengan perhitungan sesuai dengan jenis indikatornya;
- Untuk mengisi kolom (10), (11), dan (12), maka pada kolom (2), (3), dan (4) dapat ditambahkan atau disesuaikan program, kegiatan, indikator, dan targetnya dengan Renja PD Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Renstra PD Tahun 2024-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.3 pada halaman lain laporan ini.

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realiasi Capaian 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota			100% (1.500 lt/dt = 120.000 Sumbangan Rumah)		100% (1.500 lt/dt = 120.000 Sumbangan Rumah)	100% (1.500 lt/dt = 120.000 Sumbangan Rumah)	
	Persentase akses air limbah domestik layak			NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya antara lain:

- Perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung.
- Pengoordinasian kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksanaan permukiman dan bangunan gedung.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya diuraikan sebagai berikut:

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang dengan pelayanan perangkat daerah.

2.3.1.1. Tingkat Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target akhir RPJMD menyatakan tingkat kemajuan capaian tujuan/sasaran tahun 2023 dengan Target akhir RPJMD yang memiliki capaian sangat tinggi dengan satu indikator yang tidak mencapai 100%, yaitu presentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik yang memiliki realisasi kinerja 90,88% dari target RPJMD sebesar 92,50%. Hal ini dikarenakan rata-rata ruas jalan provinsi ex/upgrade dari ruas jalan kabupaten sudah melewati umur rencana dan belum pernah ditingkatkan sehingga ruas-ruas tersebut menyumbang presentase kondisi tidak mantap secara keseluruhan. Upaya penyelesaiannya adalah mengoptimalkan anggaran yang ada dengan melakukan pekerjaan rehabilitasi jalan maupun peningkatan jalan.

2.3.1.2. Koordinasi dan Sinergi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah selalu berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Kabupaten/Kota melalui kegiatan Musrenbangwil di Eks Karesidenan maupun Musrenbangprov serta dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan dalam rangka pencapaian kinerja Pembangunan daerah dan pusat.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Hal terpenting yang menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur adalah upaya meningkatkan peran dan penanganan infrastruktur dalam keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, seperti pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan tanah. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan *soft power* melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, peningkatan *Public Private Partnersip* (PPP) dan penguatan kapasitas partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang komprehensif. Permasalahan dan hambatan lain yang dihadapi yaitu :

- Terdapat ruas jalan dengan lebar kurang dari 7 m;

- Masih ada ruas jalan yang kualitas strukturnya belum sesuai standar kolektor (MST 8 Ton);
- Faktor geografis yang menyebabkan adanya ruas jalan yang berada di daerah dengan potensi rawan longsor, banjir dan tanah labil/bergerak;
- Belum cukupnya ketersediaan lahan yang diperlukan;
- Kendaraan yang melintasi jalan melebihi standar Muatan Sumbu Terberat/ODOL (*Over Dimension Over Load*);
- Kurangnya bangunan pelengkap jalan (saluran, bangunan dinding penahan tanah);
- Sudah terlampauinya umur rencana jalan;
- Intensitas hujan yang cukup tinggi mengakibatkan kondisi permukaan jalan mantap menurun;
- Masih kurangnya peralatan pendukung pemeliharaan rutin;
- Sudah terlampauinya umur layanan jembatan;
- Terdapat jembatan yang berada di daerah alur sungai dengan debit besar, berarus deras;
- Terdapat jembatan yang belum sesuai standar dengan lebar kurang dari 7 m;
- Keterbatasan JDU yang belum sampai ke rencana daerah layanan;
- Rendahnya minat masyarakat untuk memasang SR (Sambungan Rumah) yang menyebabkan idle capacity;
- Kebocoran pada pipa JDU dan pipa PDAM Offtaker;
- Keterbatasan Kabupaten / Kota yang tidak mempunyai sumber air baku potensial untuk pengembangan/ inisiasi SPAM Regional Jawa Tengah;
- Pembinaan teknis kepada KP/BP SPAM belum menyeluruh, karena keterbatasan jumlah peserta Bintek untuk tiap Kabupaten/Kota;
- Pelayanan PDAM Kabupaten/Kota masih belum optimal karena masih adanya PDAM yang belum terapkan *Full Cost Recovery* (pemulihan biaya penuh) dan tingkat *non revenue water* (tingkat kehilangan air) masih tinggi;
- Adanya desa didaerah dengan Kemiskinan Ekstrim (PKE) di Jawa Tengah yang memerlukan intervensi di bidang Air Minum;
- Belum adanya penyediaan prasarana sarana air limbah domestik regional;
- Kurangnya pembinaan teknis dan pemberdayaan/pengembangan SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan air limbah;
- Kurangnya koordinasi teknis dengan SKPD Teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah;
- Kurangnya pemahaman terkait aturan bangunan gedung dan jasa konstruksi sesuai standar;
- Kurangnya jumlah penyelenggara bangunan gedung milik daerah dan jasa konstruksi yang mendapat pembinaan;
- Kurangnya jumlah pelaku jasa konstruksi yang mendapat sertifikat;
- Harga satuan dasar yang dinamis mengikuti perkembangan pasar.

2.3.3. Penyelenggaraan tugas pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional SPM / SDG's

- Visi

Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari.

- Misi

Misi 4: Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan; Misi 5: Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.

- Pencapaian SDG's

Tujuan ke-6 yaitu Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya :

a. Tantangan :

- Masih adanya ruas – ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinyemen, struktur yang belum sesuai dengan standar jalan kolektor;
- Masih kurangnya bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan yang mengakibatkan stabilitas konstruksi jalan/jembatan terganggu;
- Belum optimalnya pelayanan air bersih yaitu disebabkan oleh kebocoran pada pipa JDU dan pipa PDAM *offtaker* dan rendahnya minat masyarakat untuk memasang SR (Sambungan Rumah) yang menyebabkan *idle capacity*;
- Sanitasi yang layak di perkotaan maupun perdesaan seperti belum adanya penyediaan prasarana sarana air limbah domestik dan kurangnya pengembangan dan penyediaan prasarana sarana air limbah domestik;
- Kurangnya pemahaman terkait aturan gedung milik daerah dan jasa konstruksi yang mendapat pembinaan menyebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan sebagaimana pedoman teknis yang berlaku;
- Belum optimalnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi mengakibatkan kurangnya jumlah pelaku jasa konstruksi yang mendapat sertifikat.

b. Peluang :

- Adanya Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;
- Adanya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur, PHJD Inpres;
- Adanya peluang pengentasan kemiskinan melalui program padat karya di bidang Kebinamargaan dan Keciptakaryaan;
- Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultasi dan perlindungan lingkungan;
- Adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa *cold milling rigid pavement* dan beton pre-cast ;
- Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih;
- Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah skala Lingkungan/kawasan/Kota ;
- Tersedianya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat;
- Meningkatnya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian bangunan bersejarah;

- Meningkatnya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah;
- Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi sudah dilengkapi dengan laboratorium uji yang memadai;
- Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi melalui sertifikasi;
- Sudah tersedia berbagai event di tingkat provinsi atau nasional sebagai media penyebarluasan informasi.

2.3.5. Formulasi Isu - isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

Strategi yang dilakukan guna meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya di masa mendatang antara lain:

- a. Terus berupaya meningkatkan kinerja jalan di Provinsi Jawa Tengah, pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi yang didukung oleh Program Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun terobosan melalui pembiayaan APBN;
- b. Pelaksanaan mitigasi bencana terhadap ruas jalan di daerah rawan banjir dan longsor, dengan penanganan secara cepat dan tepat melalui Kelompok Masyarakat Bina Marga (Pokmas Bima); dan
- c. Dilakukan penguatan kapasitas Kelompok Penerima Pemanfaat (KPP) dalam mengelola prasarana IPAL dan MCK menuju KPP mandiri dan IPAL lestari yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta meningkatkan akses sanitasi dari dasar menjadi aman.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah

Perbandingan antara rancangan awal RKPD 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sesuai tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit Kerja Perangkat Daerah
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				178.880.714	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				36.751.133	
		Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	100	5.412.421			Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	100	3.124.106	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
		Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	45,71	38.777.250			Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	45,07	6.134.770	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat
		Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	49,79	83.552.474			Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	47,91	11.651.615	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur
		Persentase panjang jalan yang dileger	87,42	628.200			Persentase panjang jalan yang dileger	77,26	109.835	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
		Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	69,1	20.995.049			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	18,07	4.807.161	Balai Pengujian dan Peralatan

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit Kerja Perangkat Daerah
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	100	21.023.445			Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	100	9.140.955	
		Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	65,22	8.491.875			Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	73,04	1.782.691	Balai Pengujian dan Peralatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				60.631.726	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				15.103.848	
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	88,2	3.934.703			Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	87,57	1.473.535	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	74,39	2.012.130			Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	71,44	1.411.740	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	93,03	28.065.775			Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	87,66	1.565.725	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	86,19	1.922.633			Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	86,19	1.922.633	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	69,15	11.470.593			Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	67,34	2.074.025	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit Kerja Perangkat Daerah
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	85,47	1.421.175			Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	85,47	1.421.175	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	92,04	6.495.653			Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	91,47	2.755.351	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	77,6	2.784.201			Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	77,37	1.245.076	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	92,8	2.524.863			Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	92,66	1.234.588	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				355.021.227	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				77.304.409	
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	98,25	35.669.114			Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	90,1	6.469.435	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	94,62	38.324.506			Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	90,2	8.604.006	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	91,68	44.569.306			Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	86,43	7.633.415	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit Kerja Perangkat Daerah
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	92,38	32.400.608			Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	89,44	9.091.504	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	90,51	47.205.613			Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	87,39	8.478.269	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	93,72	27.480.755			Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	91,47	6.002.205	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	92,75	56.165.008			Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	89,45	14.428.510	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	93,06	25.841.659			Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	91,57	5.983.333	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	97,48	47.364.658			Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	90,92	10.613.732	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				60.424.136	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				10.461.088	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit Kerja Perangkat Daerah
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Persentase akses air minum layak	93,94	1.637.636			Persentase akses air minum layak	93,94	2.095.657	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	58.786.500			Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	8.365.431	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				27.892.309	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				674.105	
		Persentase akses air limbah domestik layak	95,18	27.892.309			Persentase akses air limbah domestik layak	95,18	674.105	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				16.701.307	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				38.166.603	
		Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	5,83	16.450.500			Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	5,83	37.917.050	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit Kerja Perangkat Daerah
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	12,23	250.807			Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	12,23	249.553	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				5.337.849	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				5.335.641	
		Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	66,67	200.000			Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	66,67	200.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
		Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	48,42	5.137.849			Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	48,42	5.135.641	Balai Jasa Konstruksi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				37.255.200	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				6.457.965	
		Persentase akses air minum jaringan perpipaan	57,82	37.255.200			Persentase akses air minum jaringan perpipaan	57,82	6.457.965	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				112.823.317	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				104.408.046	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit Kerja Perangkat Daerah
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.721.277			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00	1.571.277	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	92.876.690			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00	87.821.419	SEKRETARIAT
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.534.042			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00	1.234.042	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.943.773			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00	1.943.773	Balai Pengujian dan Peralatan
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	3.698.811			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00	2.248.811	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.321.326			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00	1.091.326	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	877.790			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00	877.790	Balai Jasa Konstruksi

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit Kerja Perangkat Daerah
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	2.471.200			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00	2.021.200	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.673.028			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00	1.523.028	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.247.270			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00	1.217.270	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.991.250			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00	1.491.250	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.466.860			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00	1.366.860	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				840.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				840.000	
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	840.000			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100,00	840.000	SEKRETARIAT
		Total		855.807.785					295.502.838	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang berada di ruas jalan provinsi, sehingga program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan di luar ruas jalan yang merupakan kewenangan tidak dapat dilaksanakan. Para pemangku kepentingan tersebut mengajukan usulan melalui surat maupun melalui wadah berupa musrenbang provinsi. Penelaahan usulan Kabupaten/Kota dan Masyarakat dituangkan dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan		Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	100 %	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	5 Dokumen	SEKSI RANCANG BANGUN
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	1 Dokumen	SEKSI RANCANG BANGUN
Survey Kondisi Jalan/Jembatan				

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	3 Dokumen	SEKSI RANCANG BANGUN
Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat		Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	45,07 %	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	0,5 Km	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1
Pelebaran Jalan Menuju Standar				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pekalongan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Barat	0,5 Km	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1
Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur		Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	47,91 %	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	1,5 Km	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1
Pelebaran Jalan Menuju Standar				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Timur	1,5 Km	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1
Persentase panjang jalan yang dileger		Persentase panjang jalan yang dileger	77,26 %	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N	1402,67 Km	SEKSI RANCANG BANGUN
Pengelolaan Leger Jalan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1 Dokumen	SEKSI RANCANG BANGUN

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan		Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	18,07 %	Balai Pengujian dan Peralatan
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Tersedia	45 Unit	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT
Pemeliharaan Rutin Jalan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah	9 Unit	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara	36 Unit	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah persediaan bahan/material konstruksi penanganan kerusakan khusus	3550 Unit	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT
Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan		Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	100 %	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah	2 Dokumen	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN
Pelebaran Jalan Menuju Standar				
		Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	100 m2	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN
		Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan	13 Dokumen	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen)	1 Dokumen	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS
Pemeliharaan Rutin Jembatan				

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Panjang Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	35 m	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS
Pemeliharaan Rutin Jalan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Panjang Jalan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	0,45 Km	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS
Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi		Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	73,04 %	Balai Pengujian dan Peralatan
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi	1420 Sertifikat	SEKSI PENGUJIAN MUTU
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001	2 Dokumen	SEKSI PENGUJIAN MUTU
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah pemeliharaan alat uji	116 Unit	SEKSI PENGUJIAN MUTU
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu	65 Orang	SEKSI PENGUJIAN MUTU
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi	1420 Sertifikat	SEKSI PENGUJIAN MUTU
			83,38 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	87,57 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap	2562,67 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Pemeliharaan Rutin Jembatan				

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Cilacap	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Cilacap	2562,67 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	71,44 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang	2455,2 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Pemeliharaan Rutin Jembatan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Magelang	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Magelang	2455,2 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	87,66 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati	2723 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Pemeliharaan Rutin Jembatan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pati	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pati	2723 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	86,19 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pekalongan	3343,71 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Pemeliharaan Rutin Jembatan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pekalongan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pekalongan	3343,71 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	67,34 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi	3607 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Pemeliharaan Rutin Jembatan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Grobogan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Purwodadi	3607 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	85,47 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang	2471,61 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Pemeliharaan Rutin Jembatan				
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Semarang	2471,61 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	91,47 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta	4791,92 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Pemeliharaan Rutin Jembatan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Boyolali	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Surakarta	4791,915 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	77,37 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Tegal	2165,35 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Pemeliharaan Rutin Jembatan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Brebes	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Tegal	2165,35 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	92,66 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo	2147,11 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Pemeliharaan Rutin Jembatan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Banjarnegara	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Wonosobo	2147,11 m	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
			89,46 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	90,1 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap	205,75 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Pemeliharaan Rutin Jalan				
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Cilacap	205,75 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	90,2 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang	259,58 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Pemeliharaan Rutin Jalan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kebumen	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Magelang	259,58 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	86,43 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati	247,82 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Pemeliharaan Rutin Jalan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pati	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Pati	247,82 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	89,44 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	255,46 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Pemeliharaan Rutin Jalan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Batang	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Pekalongan	255,46 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	87,39 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	384,14 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Rehabilitasi Jalan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Grobogan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi	1 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Pemeliharaan Rutin Jalan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Grobogan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Purwodadi	383,14 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	91,47 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang	224,91 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Pemeliharaan Rutin Jalan				
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Semarang	224,91 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	89,45 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta	415,98 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Pemeliharaan Rutin Jalan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Boyolali	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Surakarta	415,981 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	91,57 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal	197,56 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Pemeliharaan Rutin Jalan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Tegal	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Tegal	197,56 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	90,92 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	246,92 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
Rehabilitasi Jalan				
	Opd Provinsi ; Jawa	Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo	1 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
	Tengah --> Wonosobo			
Pemeliharaan Rutin Jalan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Banjarnegara	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Wonosobo	245,92 Km	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
			61 Angka	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
			92,25 Angka	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pati	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pati	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pati	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pati	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pati	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	720 Dokumen	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pati	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pati	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pati	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pati	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	48 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pati	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pati	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pati	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	39 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	SEKRETARIAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	45 Dokumen	SUBBAG KEUANGAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	440 Orang	SUBBAG KEUANGAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	SUBBAG KEUANGAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD				

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semes teran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semes teran perangkat daerah	19 Laporan	SUBBAG KEUANGAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	13 Dokumen	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	13 Dokumen	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	440 Orang	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah -->	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
	Kota Semarang			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2172 Dokumen	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Laporan	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	1 Dokumen	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	298 Unit	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	9 Unit	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pengadaan Mebel				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah paket mebel yang disediakan	240 Paket	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	49 Unit	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	50 Laporan	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	26 Laporan	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	155 Unit	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 Unit	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	124 Unit	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Surakarta	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Surakarta	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Surakarta	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Surakarta	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Surakarta	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	672 Dokumen	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Surakarta	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Dokumen	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Surakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Surakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Surakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	74 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Surakarta	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Surakarta	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Surakarta	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Balai Pengujian dan Peralatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	672 Dokumen	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
	Tengah --> Semarang			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	65 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Semarang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	55 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Grobogan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Grobogan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Grobogan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Grobogan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Grobogan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	336 Dokumen	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Grobogan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Grobogan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Grobogan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Grobogan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	48 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Grobogan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Grobogan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Grobogan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	36 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Wonosobo	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Wonosobo	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Wonosobo	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Wonosobo	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Wonosobo	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	672 Dokumen	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Wonosobo	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Wonosobo	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Wonosobo	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Wonosobo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	35 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Wonosobo	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Wonosobo	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Wonosobo	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	26 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Balai Jasa Konstruksi
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	672 Dokumen	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah -->	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
	Kota Semarang	air dan listrik yang disediakan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	41 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	41 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %	SUB BAGIAN TATA USAHA

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Cilacap	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Cilacap	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Cilacap	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Cilacap	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Cilacap	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	672 Dokumen	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Cilacap	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Cilacap	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Cilacap	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Cilacap	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	132 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Cilacap	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Cilacap	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Cilacap	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	118 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %	SUB BAGIAN TATA USAHA

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	384 Dokumen	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Opd Provinsi ; Jawa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
	Tengah --> Kota Semarang			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	58 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	55 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Tegal	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Tegal	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Tegal	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Tegal	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Tegal	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	336 Dokumen	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Tegal	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Tegal	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Tegal	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Tegal	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	33 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Tegal	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Tegal	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Tegal	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	24 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Magelang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Magelang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Magelang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Magelang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Magelang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	702 Dokumen	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Magelang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Magelang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Magelang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Magelang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	70 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Magelang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Magelang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Magelang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	55 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pekalongan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pekalongan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pekalongan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pekalongan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pekalongan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	672 Dokumen	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pekalongan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pekalongan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pekalongan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pekalongan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	98 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pekalongan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pekalongan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	91 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
			3,11 Angka	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %	SEKRETARIAT
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %	SUBBAG PROGRAM
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	21 Dokumen	SUBBAG PROGRAM
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	45 Laporan	SUBBAG PROGRAM
				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
			39,03 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
			61,65 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah		Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	5,83 %	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				
		Jumlah Lokasi Komplek BGMD yang Diberi Bantuan Teknis Pada Tahun N	60 Lokasi	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI
Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah Peserta mengikuti pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung kepada penyelenggara bangunan gedung, dan masyarakat	160 Orang	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI
		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung negara	80 Orang	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI
Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota				
	Opd Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	60 Dokumen	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				
	Opd Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	4 Dokumen	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI
Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis		Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	12,23 %	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				
		Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n	126 Lokasi	
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				
	Opd Provinsi	Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis sampai dengan tahun Ke-n	1 Dokumen	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi		Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	66,67 %	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	1 Dokumen	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				
	Opd Provinsi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	320 Orang	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI
Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi		Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	48,42 %	Balai Jasa Konstruksi
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				
		Jumlah Tenaga Bidang Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi	11779 Orang	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	2000 Orang	SUB BAGIAN TATA USAHA
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
		Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	1200 Orang	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi				
		Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	5 Kegiatan	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	2 Dokumen	SUB BAGIAN TATA USAHA
		Jumlah pengadaan Buku Konstruksi	125 Buah	SUB BAGIAN TATA USAHA
		Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani	1 Kegiatan	SUB BAGIAN TATA USAHA
		Jumlah stand pameran yang dilaksanakan	4 Unit	SUB BAGIAN TATA USAHA
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	80 Orang	SUB BAGIAN TATA USAHA
Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				
		Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi	1 Dokumen	
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	4 Laporan	
				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
			39,03 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Marga dan Cipta Karya
			42,93 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
Persentase akses air minum layak		Persentase akses air minum layak	93,94 %	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
		Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Layak Th-N (Jiwa)	34502341 Orang	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun (fs, rispam, ded, amdal) (dokumen) Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)	6 Dokumen	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				
	Opd Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota)	15 Kabupaten/Kota	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM
Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	100 %	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
		Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota	3,5 Liter	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
	Opd Provinsi ; Jawa Tengah --> Kebumen	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/detik)	3,5 Liter	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM
				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
			39,03 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
			12,5 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
Persentase akses air limbah domestik layak		Persentase akses air limbah domestik layak	95,18 %	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional				
		Jumlah Penduduk yang Sudah Mempunyai Akses Air Limbah Domestik Layak Th-N	35500068 Orang	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				
	Opd Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi dalam pengelolaan air limbah domestik (Kab/Kota)	12 Kabupaten/Kota	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ c Volume	Unit Kerja Perangkat Daerah
			42,93 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
Persentase akses air minum jaringan perpipaan		Persentase akses air minum jaringan perpipaan	57,82 %	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
		Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jiwa)	21236165 Orang	SEKSI PENGEMBANG AN AIR MINUM
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
	Opd Provinsi	Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa	12 Lokasi	SEKSI PENGEMBANG AN AIR MINUM

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan.

sebagai penjabaran tahun keempat dari RPJMN Tahun 2020-2024 memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu: “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2024 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya meliputi adalah sebagai berikut:

- a) Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meliputi Peningkatan aksesibilitas serta konektivitas :
 - Jalan akses dan penghubung antar obyek pariwisata penghubung Borobudur – Dieng (ruas Magelang-Kaliangkrik-Sapuran-Kertek-Wonosobo-Dieng); penghubung obyek pariwisata Sangiran–Tawangmangu (Gemolong - Sragen – Karanganyar dan Palur – Karanganyar - Tawangmangu); penghubung obyek pariwisata Karimunjawa (ruas Jepara – Keling – Tayu - Pati);
 - Jalan akses menuju kawasan industri terpadu dan penghubung antar Wilayah Pengembangan Wanarakuti-Subosukawanasraten (Pati -

Purwodadi - Gemolong - Surakarta); penghubung antar Wilayah Pengembangan Bergasmalang - Petanglong - Kedungsepur (ruas Jatinegara - Slawi, Kesesi/Bts.Kab. Pekalongan-Bantarbolang, Jatibarang - Ketanggungan, Slawi - Jatibarang/ Bts.Kab. Brebes, Randudongkal - Jatinegara Bts.Kab. Tegal, Kesesi/ Bts.Kab. Pekalongan - Bantarbolang, Kebonagung - Kesesi / Bts.Kab. Pekalongan, Kebonagung -Bts.Kab. Batang, Wonotunggal - Bts.Kab. Pekaongan, Batang - Wonotunggal - Surjo, Banyuputih - Plantungan / Bts. Kendal, Plantungan - Sukorejo/Blimbing, Cangkiran - Boja - Sukorejo, Cangkiran - Ungaran/Bts. Kodya Semarang, Fly Over Ganefo Mranggen); penghubung antar Wilayah Pengembangan Bergasmalang - Barlingmascakeb (ruas Kersana - Bandungsari - Salem, Pemalang - Randudongkal - Belik - Purbalingga - Bobotsari - Klampok - Purbalingga - Mandiraja - Ketileng - Gombong - Sempor, Menganti - Kesugihan, Buntu - Kroya - Slarang);

- Jalan perbatasan antar provinsi : Jateng. - Jabar (ruas Bandungsari - Penanggapan, Ketanggungan - Kersana - Bandungsari, Sidareja - Cukangleuleus); Jateng - Jatim (ruas Purwantoro - Nawangan/Bts. Prov.Jatim, Ngadirojo - Biting / Bts. Prov. Jatim, Karanganyar - Tawangmangu - Kalisoro, Kalisoro - Cemorosewu Bts. Prov. Jatim, Lasem - Sale/Bts. Prov. Jatim, Singget - Dopleng - Cepu); Jateng - DIY (ruas Purworejo - Sibolong Bts. DIY, Muntilan - KlamongBts. DIY, Karangwuni - Cawas - Jentir, Namengan - Krendetan, Cawas - Krendetan - Watukelir - Grogol - Manyaran, Wuryantoro - Eromoko-Pracimantoro, Wonogiri - Manyaran - Blimbing);
- Melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga, Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang, melalui koordinasi secara intensif sesuai kewenangannya dengan Kementerian/Lembaga terkait.

- b) Prioritas Nasional 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, meliputi Peningkatan kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi melalui fasilitasi Sertifikat Keahlian (SKA) dan tenaga terampil; Pengembangan informasi jasa konstruksi; Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia bantuan tenaga teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD).
- c) Prioritas Nasional 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, meliputi Kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun SPAM Regional Petanglong, Keburejo, Wososukas dan menyiapkan SPAM Regional Dadimuria; Pengembangan kapasitas layanan SPAM skala perkotaan dan perdesaan; Memenuhi kebutuhan air baku secara terkoordinasi lintas sektoral; Mengembangkan sarana prasarana sanitasi air limbah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

3.2.1. Tujuan

Untuk mendukung Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 yang tertuang dalam RPD diarahkan pada tujuan "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Jalan Provinsi;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan;
- c. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.

3.2.2. Sasaran

Sasaran akan menjadi pedoman dalam penyusunan kegiatan, alokasi sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penetapan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor;
- b. Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap;
- c. Meningkatnya Akses Air Minum Aman
- d. Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman
- e. Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
- g. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dan sasaran dituangkan dalam tabel berikut,

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas Jalan Provinsi				
			Persentase Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor dan Kondisi Permukaan Mantap	%	68,01
		Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor	Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	%	46,55
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	%	89,46
			Persentase Kondisi Jembatan Provinsi Baik	%	83,38
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakarya				
			Indeks Pelayanan Keciptakarya	Angka	39,03
		Meningkatnya Akses Air Minum Aman	Persentase Akses Air Minum Aman	%	42,93
		Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman	Persentase Akses Air Limbah Domestik Aman	%	12,50
		Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah	Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah	%	61,65

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar		
3.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah				
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	61,00
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92,25
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,11

3.3 Manajemen Risiko Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.2 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	Ketersediaan infrastruktur jaringan jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan	16	Pertumbuhan Pusat Ekonomi baru, menyebabkan Lintas Harian Rata-rata melebihi Lalu Lintas diatas rencana dan penyediaan lahan serta kemampuan pendanaan pemerintah daerah yang terbatas	Menghambat kelancaran usaha pekerjaan masyarakat/ tingkat produktivitas tenaga kerja/ yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.	Penentuan skala prioritas penanganan ruas-ruas jalan berdasarkan Pertumbuhan Wilayah, LHR, kondisi Geografis, Kondisi Struktur	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	>15 Tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman	Persentase akses air limbah domestik aman	Rendahnya penyedotan lumpur tinja untuk di olah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	16	Tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penyedotan lumpur tinja	Pencemaran lingkungan	Pembangunan IPLT	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	2 tahun

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 menyesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Jalan

- Program ini diarahkan pada peningkatan Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat dan Timur Provinsi Jawa Tengah;
- Program ini diarahkan pada peningkatan pencapaian Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap dan jembatan dalam kondisi baik yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Pengelolaan Jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Program ini diarahkan pada peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan, dan persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi;
- Program ini diarahkan pada peningkatan Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan; Persentase pengawasan; pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan; dan persentase panjang jalan yang dileger

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini diarahkan pada peningkatan Persentase akses air minum jaringan perpipaan; Persentase akses air minum layak; dan Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.

c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada peningkatan Persentase akses air limbah domestik layak.

d. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada peningkatan Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah; dan Persentase kompleks bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis.

e. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada peningkatan persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi dan Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini diarahkan pada peningkatan Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah; Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah

kualitas pelayanan perangkat daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Secara rinci program dan kegiatan beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 untuk sumber dana APBD dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor dan kondisi permukaan mantap										%	68,01	129.159.390.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor											36.751.133.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
			Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor								%	46,55	36.751.133.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
				1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								36.751.133.000		
						Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan					%	100	3.124.106.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi							3.124.106.000		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan				Dokumen	5	3.124.106.000	SEKSI RANCANG BANGUN	
				1.03.10.1.01.0041			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						2.049.553.000		
													2.049.553.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				1.03.10.1.01.0043			Survey Kondisi Jalan/Jembatan						1.074.553.000		
													1.074.553.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat					%	45,07	6.134.770.000	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	
				1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi							6.134.770.000		
							Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat				Km	0,5	6.134.770.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
				1.03.10.1.01.0040			Pelebaran Jalan Menuju Standar						6.134.770.000		
													6.134.770.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur					%	47,91	11.651.615.000	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	
				1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi							11.651.615.000		
							Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur				Km	1,5	11.651.615.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
				1.03.10.1.01.0040			Pelebaran Jalan Menuju Standar						11.651.615.000		
													11.651.615.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase panjang jalan yang dileger					%	77,26	109.835.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi							109.835.000		
							Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N				Km	1402,67	109.835.000	SEKSI RANCANG BANGUN	
				1.03.10.1.01.0044			Pengelolaan Leger Jalan						109.835.000		
													109.835.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan					%	18,07	4.807.161.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi							4.807.161.000		
							Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Tersedia				Unit	45	4.807.161.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	
				1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan						4.807.161.000		
													135.000.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
													1.872.441.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
													2.799.720.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan					%	100	9.140.955.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi							9.140.955.000		
							Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah				Dokumen	2	5.750.000.000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	
				1.03.10.1.01.0040			Pelebaran Jalan Menuju Standar						5.750.000.000		
													5.750.000.000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	
													3.390.955.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	
				1.03.10.1.01.0024			Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan				Dokumen	13	3.390.955.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	
													347.760.000		
													347.760.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan						780.165.000		
													780.165.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan						2.263.030.000		
													2.263.030.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi					%	73,04	1.782.691.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi							1.782.691.000		
							Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi				Sertifikat	1420	1.782.691.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	
				1.03.10.1.01.0028			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan						1.782.691.000		
													452.325.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
							Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001				Dokumen	2	452.325.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
							Jumlah pemeliharaan alat uji				Unit	116	215.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

										Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu	Orang	65	680.628.000	SEKSI PENGLIJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
										Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi	Sertifikat	1420	434.738.000	SEKSI PENGLIJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap											92.408.257.000		
			Persentase kondisi jembatan provinsi baik								%	83,38	15.103.848.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
				1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								15.103.848.000		
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap					%	87,57	1.473.535.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi								1.473.535.000		
								Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap			m	2562,67	1.473.535.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.0026									1.473.535.000		
													1.473.535.000		
													1.473.535.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang					%	71,44	1.411.740.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi								1.411.740.000		
								Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang			m	2455,2	1.411.740.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.0026									1.411.740.000		
													1.411.740.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati					%	87,66	1.565.725.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi								1.565.725.000		
								Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati			m	2723	1.565.725.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.0026									1.565.725.000		
													1.565.725.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan					%	86,19	1.922.633.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi								1.922.633.000		
								Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pekalongan			m	3343,71	1.922.633.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.0026									1.922.633.000		
													1.922.633.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi					%	67,34	2.074.025.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi								2.074.025.000		
								Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi			m	3607	2.074.025.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.0026									2.074.025.000		
													2.074.025.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang					%	85,47	1.421.175.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi								1.421.175.000		
								Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang			m	2471,61	1.421.175.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.0026									1.421.175.000		
													1.421.175.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta					%	91,47	2.755.351.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	
				1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi								2.755.351.000		
								Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta			m	4791,92	2.755.351.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.0026									2.755.351.000		
													2.755.351.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal					%	77,37	1.245.076.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi								1.245.076.000		
								Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Tegal			m	2165,35	1.245.076.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.0026									1.245.076.000		
													1.245.076.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo					%	92,66	1.234.588.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi								1.234.588.000		
								Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo			m	2147,11	1.234.588.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.0026									1.234.588.000		
													1.234.588.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap					%	89,46	77.304.409.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
				1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								77.304.409.000		
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap					%	90,1	6.469.435.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi								6.469.435.000		
								Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap			Km	205,75	6.469.435.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.0033									6.469.435.000		
													6.469.435.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
													6.469.435.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	

									Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	64.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
			X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				28.000.000		
								Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1		28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
			X.XX.01.1.06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.000.000		
								Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2		22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
			X.XX.01.1.06.0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		
								Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	720		3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
			X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				190.200.000		
								Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12		190.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
			X.XX.01.1.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					835.577.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26		835.577.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12		7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
			X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				126.060.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12		126.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
			X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				702.517.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2		702.517.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
			X.XX.01.1.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					400.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	48		400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				160.000.000		
								Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6		160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
			X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
								Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3		200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
			X.XX.01.1.09.0010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
								Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	39		40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
							Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		%	100		87.821.419.000	SEKRETARIAT	
			X.XX.01.1.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					75.351.549.000		
								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	45		75.351.549.000	SUBBAG KEUANGAN	
			X.XX.01.1.02.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				72.898.309.000		
								Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	440		72.898.309.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
			X.XX.01.1.02.0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.013.240.000		
								Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12		2.013.240.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
			X.XX.01.1.02.0007					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				440.000.000		
								Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	19		440.000.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
			X.XX.01.1.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					350.000.000		
								Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	13		350.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			X.XX.01.1.03.0002					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				350.000.000		
								Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	13		350.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
			X.XX.01.1.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					193.000.000		
								Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100		193.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			X.XX.01.1.05.0009					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				193.000.000		
								Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	440		193.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
			X.XX.01.1.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.788.500.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		2.788.500.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		

									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
			X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				116.000.000		
								Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	116.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
			X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				361.500.000		
								Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	361.500.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
			X.XX.01.1.06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				84.000.000		
								Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	84.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
			X.XX.01.1.06.0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				21.000.000		
								Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2172	21.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
			X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.037.000.000		
								Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	2.037.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
			X.XX.01.1.06.0010					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				77.000.000		
								Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	77.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
			X.XX.01.1.06.0011					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				72.000.000		
								Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	72.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
			X.XX.01.1.07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.371.613.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	298	1.371.613.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
			X.XX.01.1.07.0002					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				378.000.000		
								Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	9	378.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
			X.XX.01.1.07.0005					Pengadaan Mebel				240.000.000		
								Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	240	240.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
			X.XX.01.1.07.0006					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				753.613.000		
								Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	49	753.613.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
			X.XX.01.1.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.318.157.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	50	5.318.157.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
			X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24.000.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	24.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
			X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.800.000.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.800.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
			X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.494.157.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	26	3.494.157.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
			X.XX.01.1.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.448.600.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	155	2.448.600.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
			X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.233.600.000		
								Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	30	1.233.600.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
			X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000.000		
								Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	600.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
			X.XX.01.1.09.0010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				615.000.000		
								Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	124	615.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
								Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		%	100	1.234.042.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
			X.XX.01.1.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah				249.500.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan		%	100	249.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
								Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA	
			X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43.000.000		
								Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA	
			X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.000.000		

								Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
			X.XX.01.1.06.0005					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20.000.000		
								Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
			X.XX.01.1.06.0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			3.500.000		
								Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
			X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			170.000.000		
								Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Dokumen	12	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
			X.XX.01.1.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				589.542.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	589.542.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
			X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			121.500.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	121.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
			X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			464.042.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	464.042.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
			X.XX.01.1.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				395.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	74	395.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			195.000.000		
								Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	18	195.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
			X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			150.000.000		
								Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
			X.XX.01.1.09.0010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000.000		
								Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	50	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah			%	100	1.943.773.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
			X.XX.01.1.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah				327.188.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	327.188.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.025.000		
								Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	25.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
			X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			48.255.000		
								Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	48.255.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
			X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			75.000.000		
								Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
			X.XX.01.1.06.0005					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			10.200.000		
								Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	10.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
			X.XX.01.1.06.0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			2.500.000		
								Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
			X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			166.208.000		
								Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	166.208.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
			X.XX.01.1.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.310.325.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.310.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
			X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			248.940.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	248.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
			X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.059.385.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	1.059.385.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
			X.XX.01.1.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				306.260.000		

							Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	65	306.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				117.480.000		
								Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	9		117.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
			X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
								Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
			X.XX.01.1.09.0010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				88.780.000		
								Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	55		88.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah			%	100		2.248.811.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
			X.XX.01.1.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah					355.500.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		355.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.500.000		
								Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		14.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
			X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				61.000.000		
								Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1		61.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
			X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.000.000		
								Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1		18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
			X.XX.01.1.06.0005					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				50.000.000		
								Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	2		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
			X.XX.01.1.06.0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.000.000		
								Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	336		2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
			X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				210.000.000		
								Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12		210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
			X.XX.01.1.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.331.165.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26		1.331.165.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
			X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				242.000.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12		242.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
			X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.083.165.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2		1.083.165.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
			X.XX.01.1.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					562.146.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	48		562.146.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				137.830.000		
								Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8		137.830.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
			X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				350.000.000		
								Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4		350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
			X.XX.01.1.09.0010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				74.316.000		
								Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	36		74.316.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah			%	100		1.091.326.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
			X.XX.01.1.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah					247.500.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		247.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.000.000		
								Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
			X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37.000.000		

									Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	37.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
			X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.000.000		
								Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1		13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
			X.XX.01.1.06.0005					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				36.000.000		
								Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2		36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
			X.XX.01.1.06.0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		
								Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672		2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
			X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				143.000.000		
								Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12		143.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
			X.XX.01.1.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					490.716.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26		490.716.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12		2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
			X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				77.000.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12		77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
			X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				411.216.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2		411.216.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
			X.XX.01.1.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					353.110.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	35		353.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				165.660.000		
								Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8		165.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
			X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		
								Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
			X.XX.01.1.09.0010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.450.000		
								Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	26		37.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
							Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		%	100		877.790.000	Balai Jasa Konstruksi	
			X.XX.01.1.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah					153.300.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		153.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.300.000		
								Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		9.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
			X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.600.000		
								Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1		38.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
			X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.300.000		
								Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1		9.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
			X.XX.01.1.06.0005					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.900.000		
								Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2		2.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
			X.XX.01.1.06.0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		
								Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672		3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
			X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				89.700.000		
								Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12		89.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
			X.XX.01.1.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					542.490.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26		542.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.600.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12		1.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
			X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				94.000.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12		94.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
			X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				446.890.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2		446.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						182.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan		Unit	41		182.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.000.000		
									Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4		55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
									Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.09.0010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		
									Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	41		27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
							Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawain, dan keuangan perangkat daerah			%	100		2.021.200.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						373.000.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan		%	100		373.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.000.000		
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				57.500.000		
									Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1		57.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.000.000		
									Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1		16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				X.XX.01.1.06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				48.000.000		
									Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2		48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				X.XX.01.1.06.0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.000.000		
									Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				231.500.000		
									Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12		231.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.187.200.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun		Laporan	26		1.187.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12		7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				188.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12		188.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				992.200.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2		992.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						461.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan		Unit	132		461.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				180.000.000		
									Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	9		180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
									Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5		200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				X.XX.01.1.09.0010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				81.000.000		
									Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	118		81.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
							Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawain, dan keuangan perangkat daerah			%	100		1.523.028.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						235.330.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan		%	100		235.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.680.000		
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		9.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

										Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung negara	Orang	80	50.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	
			1.03.08.1.01.0018						Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota				180.000.000		
										Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	60	180.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi
			1.03.08.1.01.0019						Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				37.587.050.000		
										Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	4	37.587.050.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi
								Persentase kompleks bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis			%	12,23	249.553.000		
			1.03.08.1.01					Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					249.553.000		
								Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n			Lokasi	126	249.553.000		
			1.03.08.1.01.0019					Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					249.553.000		
								Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis sampai dengan tahun Ke-n			Dokumen	1	249.553.000		OPD Provinsi
			1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI									5.335.641.000		
								Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi			%	66,67	200.000.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
			1.03.11.1.01					Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					200.000.000		
								Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			Dokumen	1	200.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	
			1.03.11.1.01.0012					Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi					200.000.000		
								Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			Orang	320	200.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi
								Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi			%	48,42	5.135.641.000	Balai Jasa Konstruksi	
			1.03.11.1.01					Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					3.842.143.000		
								Jumlah Tenaga Bidang Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi			Orang	11779	3.842.143.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			1.03.11.1.01.0011					Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli					2.065.143.000		
								Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Orang)			Orang	2000	2.065.143.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
			1.03.11.1.01.0014					Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli					1.777.000.000		
								Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi			Orang	1200	1.777.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			1.03.11.1.02					Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi					807.500.000		
								Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			Kegiatan	5	807.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			1.03.11.1.02.0008					Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi					682.500.000		
								Jumlah Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi			Dokumen	2	247.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
								Jumlah pengadaan Buku Konstruksi			Buah	125	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
								Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani			Kegiatan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
								Jumlah stand pameran yang dilaksanakan			Unit	4	360.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			1.03.11.1.02.0009					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI					125.000.000		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI			Orang	80	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
			1.03.11.1.03					Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					485.998.000		
								Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi			Dokumen	1	485.998.000		
			1.03.11.1.03.0006					Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi					485.998.000		
								Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi			Laporan	4	485.998.000		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakarya (LH)													10.461.088.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		Indeks Pelayanan Keciptakarya									%	39,03		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		Meningkatnya Akses Air Minum Aman											10.461.088.000		
			Persentase akses air minum aman								%	42,93	10.461.088.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
			1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM									10.461.088.000		
								Persentase akses air minum layak			%	93,94	2.095.657.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
			1.03.03.1.01					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					2.095.657.000		
								Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Layak Th-N (jiwa)			Orang	34502341	2.095.657.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	

				1.03.03.1.01.0015				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					1.453.657.000		
									Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun (fs, rispam, ded, amdal) (dokumen)	Dokumen		6	1.453.657.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				1.03.03.1.01.0016				Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					642.000.000		
									Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembiayaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota)	Kabupaten/ Kota		15	642.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi
						Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota				%		100	8.365.431.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				1.03.03.1.01				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					8.365.431.000		
								Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota		Liter		3,5	8.365.431.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
				1.03.03.1.01.0017				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					8.365.431.000		
									Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/detik)	Liter		3,5	8.365.431.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> Wonogiri
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakarya (PE)													7.132.070.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Indeks Pelayanan Keciptakarya														
		Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman													
			Persentase akses air limbah domestik aman												
				1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										
						Persentase akses air limbah domestik layak									
				1.03.05.1.01				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional							
									Jumlah Penduduk yang Sudah Mempunyai Akses Air Limbah Domestik Layak Th-N		Orang	35500068	674.105.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	
				1.03.05.1.01.0014				Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							
									Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi dalam pengelolaan air limbah domestik (Kab/Kota)	Kabupaten/ Kota		12	674.105.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi
		Meningkatnya Akses Air Minum Aman													
			Persentase akses air minum aman												
				1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										
						Persentase akses air minum jaringan perpipaan									
				1.03.03.1.01				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota							
									Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jawa)		Orang	21236165	6.457.965.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
				1.03.03.1.01.0017				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota							
									Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa	Lokasi		12	6.457.965.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	Magelang Purworejo Wonosobo Banjarnegara Grobogan
JUMLAH													295.502.838.000		

4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Tabel 4.2 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM								
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang dileger	1. Kurangnya dokumen pendukung kepemilikan lahan terkait batas wilayah untuk penyelenggaraan jalan 2. Kurangnya dokumen sekunder terkait perencanaan desain	12	Belum semua ruas jalan terleger berdasarkan SK Gubernur	1. Timbulnya konflik terkait kepemilikan lahan dengan tanah sekitar 2. Diperlukan tambahan waktu perencanaan desain untuk mendapatkan data sekunder melalui survei lengkap	Usulan terkait pembuatan serentak serta pemutakhiran leger jalan (prioritas pada daerah batas provinsi)	Kepala Bidang	2025
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	Masih terjadinya temuan hasil pengawasan eksternal	12	Ketidaksesuaian antara dokumen pendukung konsultan dan hasil pemeriksaan auditor	Penilaian kinerja konsultan rendah	Peningkatan kapasitas penyedia jasa dengan workshop/sosialisasi	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	2025

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	Tidak terpenuhinya standar geometrik dan struktur jalan berkeselamatan	25	Kondisi topografi, kerawanan bencana dan umur rencana konstruksi sudah terlampaui	Rawan terjadi kecelakaan	Perbaiki alinyemen vertikal dan peningkatan struktur jalan	Kepala Bidang	1 Tahun Anggaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	Tidak terpenuhinya standar geometrik dan struktur jalan berkeselamatan	15	Kondisi topografi, kerawanan bencana dan umur rencana konstruksi sudah terlampaui	Rawan terjadi kecelakaan	peningkatan struktur jalan	Kepala Bidang	1 Tahun Anggaran
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Ketersediaan sumber air baku SPAM Regional tidak kontinyu	12	Penurunan debit sumber air baku SPAM Regional akibat perubahan iklim	Kapasitas produksi air curah SPAM Regional tidak dapat memenuhi permintaan layanan	Koordinasi terkait rencana Pembangunan tampungan air baku	Kepala Dinas PU BMCK	1 tahun

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase akses air limbah domestik layak	Pembangunan infrastruktur akses layanan dasar air limbah domestik belum memadai	16	Pembangunan akses layanan dasar air limbah domestik di Kabupaten/Kota belum menjadi prioritas.	Berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat	Pembangunan sarpras IPAL Komunal untuk dihibahkan kepada kelompok masyarakat	Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	1 tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Meningkatkan peran serta Mas BIMA dalam pengamatan kondisi jalan	Kepala Balai	1 Tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Mengusulkan kegiatan rehabilitasi/peningkatan jalan yang mengalami kerusakan ringan dan rusak berat	Kepala Balai	Sepanjang tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	Kondisi permukaan jalan yang cepat rusak	16	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Meningkatkan peran serta Mas BIMA dalam pengamatan kondisi jalan.	Kepala Balai	1 tahun

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Meningkatkan peran serta MAsBIMA dalam pengamatan kondisi jalan	Kepala Balai	1 tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	Kondisi Permukaan Jalan Cepat Rusak	16	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Meningkatkan peran serta MasBIMA dalam pengamatan kondisi jalan	Kepala Balai	1 Tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Kondisi Permukaan Jalan Cepat Rusak	16	Penanganan Tidak Sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	meningkatkan peran serta MAS BIMA dalam pengamatan kondisi jalan	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	1 Tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Meningkatkan peran serta Mas BIMA dalam pengamatan kondisi jalan	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	1 Tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan tidak nyaman bagi pengguna jalan	Meningkatkan peran serta MAS BIMA dalam pengamatan kondisi jalan	Kepala BPJ Wilayah Purwodadi	1 Tahun

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	meningkatkan peran mas BIMA dalam pengamatan kondisi jalan	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	1 Tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	Kerusakan peralatan dan alat berat pemeliharaan rutin	12	Banyaknya peralatan kebinamargaan yang dimiliki sudah lama tahun perolehannya	Kurang optimalnya operasional peralatan dan alat berat dalam melaksanakan pemeliharaan rutin jalan serta menurunnya tingkat kepercayaan eksternal	Menentukan Skala prioritas pemeliharaan rutin peralatan dan alat berat	Kepala Balai	1 Tahun
KEGIATAN								
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi	Jembatan dengan NK 3	12	Keterbatasan anggaran sehingga hanya mampu menangani dengan pemeliharaan rutin, seharusnya dengan rehabilitasi jembatan. Contoh : Lantai Jembatan Pandanarum banyak lubang, penanganan : tambal lubang	Keamanan dan kenyamanan berkendara berkurang	Rehabilitasi jembatan	Kepala BPJ Wilayah Purwodadi	-

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Tersedia	Kerusakan peralatan kebinamargaan dan pemeliharaan rutin	12	Banyaknya peralatan kebinamargaan yang dimiliki sudah lama tahun perolehannya	Kurang optimalnya operasional peralatan dan alat berat dalam melaksanakan pemeliharaan rutin jalan serta menurunnya tingkat kepercayaan eksternal	Menentukan skala prioritas pemeliharaan rutin peralatan dan alat berat	Kepala Balai	1 Tahun

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah merupakan tindak lanjut jangka pendek yang sebelumnya sudah direncanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pada Renstra. Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah harus memiliki keterpaduan dan kesesuaian dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah agar Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah dapat tercapai.

Program dan Kegiatan sesuai Renja yang disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang termuat dalam RPD dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM Nasional. Alokasi Penggunaan dana diprioritaskan untuk pemenuhan/penyelesaian kegiatan Kontrak Tahun Jamak yaitu Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Magelang; pemenuhan komitmen dengan Pemerintah pusat dan kabupaten/kota yaitu Pembangunan Jaringan Distribusi Utama SPAM Regional; dan kegiatan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi baik jalan dan jembatan; serta melaksanakan pembangunan sesuai tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mengantisipasi kemungkinan ketersediaan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah akan mengoptimalkan anggaran dan melakukan penajaman prioritas kegiatan dengan menjaga target tetap tercapai dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah.

Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi jaringan jalan yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, perekat antar daerah/wilayah perbatasan provinsi, menumbuhkembangkan kegiatan pariwisata sebagai stimulant bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah serta perluasan akses pelayanan sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung daya saing Jawa Tengah sesuai capaian indikator yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.

Demikian penyusunan dokumen ini semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin.

LAMPIRAN

Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Perencanaan yang berbasis risiko menjadi hal penting agar sejak awal perencanaan, perangkat daerah sudah dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang, dan sudah dilakukan upaya mitigasi sejak awal. Oleh karena itu dalam menyusun Renja PD, manajemen risiko menjadi proses yang terintegrasi dan dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan Renja PD. Kertas kerja manajemen risiko harus dilampirkan dalam dokumen Renja PD. Proses manajemen risiko berdasarkan pada Pergub Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tahapan manajemen risiko dilakukan secara terpisah antara risiko tujuan/sasaran perangkat daerah, program, dan kegiatan.

a. Identifikasi Risiko

Tabel 1
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	SASARAN							
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	Ketersediaan infrastruktur jaringan jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan	Risiko Operasional	Pertumbuhan Pusat Ekonomi baru, menyebabkan Lintas Harian Rata-rata melebihi Lalu Lintas diatas rencana dan penyediaan lahan serta kemampuan pendanaan pemerintah daerah yang terbatas	Menghambat kelancaran usaha pekerjaan masyarakat/ tingkat produktivitas tenaga kerja/ yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya; Masyarakat Pengguna jalan
2	Sasaran Strategis	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap	Kerusakan jalan diluar perencanaan	Risiko Operasional	Penggunaan jalan oleh pemakai melebihi batas beban maksimal yang diperbolehkan, Perkerasan jalan melampaui umur layanan	Jalan menjadi rusak dan potensi kecelakaan meningkat	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya; Masyarakat Pengguna jalan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Strategis	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap	Persentase kondisi jembatan provinsi baik	Kerusakan jembatan diluar perencanaan	Risiko Operasional	Penggunaan jembatan oleh pemakai melebihi batas beban maksimal yang diperbolehkan	KONstruksi jematan terdapat kerusakan dengan tingkat kerusakan yang cenderung tinggi	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya; Masyarakat Pengguna jalan
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Kurang sesuainya risiko yang diidentifikasi dengan kondisi yang ada.	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman unit pemilik risiko terkait analisis risiko	Kurang optimalnya dalam tindak pengendalian risiko	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
5	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan pelayanan tidak sesuai ketentuan dan tidak tepat waktu	Risiko Strategis	Keterbatasan SDM dalam menjalankan SOP pelayanan yang sudah ada	Penyelenggaraan pelayanan publik tidak optimal	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
6	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah	Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju	Masih terdapatnya komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dengan kondisi fisik yang kurang berfungsi sesuai	Risiko Operasional	Data BGMD yang ada belum di-update kondisi fisiknya	Penanganan BGMD berdasarkan usulan pengguna BGMD	Pengguna Gedung

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			berfungsi baik sesuai standar	standar				
7	Sasaran Strategis	Meningkatnya Akses Air Minum Aman	Persentase akses air minum aman	Sambungan Rumah (SR) Layanan PDAM Kabupaten/Kota Offtaker SPAM Regional belum sepenuhnya terbangun	Risiko Operasional	Kurangnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota Offtaker dalam penyerapan air curah dari SPAM Regional	Kurangnya realisasi serapan dari SPAM Regional yang mengakibatkan Idle Capacity air curah	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, PT. Tirta Utama Jawa Tengah, Kab/Kota Offtaker
8	Sasaran Strategis	Meningkatnya Akses Air Minum Aman	Persentase akses air minum aman	Capaian Akses Jaringan Perpipaan di Kabupaten/Kota masih rendah	Risiko Operasional	Kurangnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan layanan SPAM terbangun	Belum optimalnya realisasi masyarakat yang mendapatkan akses SR	Masyarakat, Desa/ Kelurahan, Kabupaten/Kota

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Sasaran Strategis	Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman	Persentase akses air limbah domestik aman	Rendahnya penyedotan lumpur tinja untuk di olah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Risiko Operasional	Tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penyedotan lumpur tinja	Pencemaran lingkungan	Masyarakat
B.	PROGRAM							
1	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Perencanaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disusun tidak sesuai perencanaan	Risiko Operasional	1. Kurangnya pemahaman dan komitmen PD 2. SDM kurang cermat 3. Kurangnya koordinasi internal	Target kinerja tidak tercapai	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	Pelaksanaan pelayanan tidak sesuai ketentuan dan tidak tepat waktu	Risiko Operasional	- Kurang disiplin - kurangnya pengawasan - kurangnya koordinasi dengan unit kerja	Data dan informasi tidak dapat digunakan	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			perangkat daerah			- kurang teliti - Pengumpulan data dan informasi bersifat insidentil		
3	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang dileger	1. Kurangnya dokumen pendukung kepemilikan lahan terkait batas wilayah untuk penyelenggaraan jalan 2. Kurangnya dokumen sekunder terkait perencanaan desain	Risiko Operasional	Belum semua ruas jalan terleger berdasarkan SK Gubernur	1. Timbulnya konflik terkait kepemilikan lahan dengan tanah sekitar 2. Diperlukan tambahan waktu perencanaan desain untuk mendapatkan data sekunder melalui survei lengkap	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	Masih terjadinya reviu desain	Risiko Operasional	Timbul perubahan lokasi dan lingkup pekerjaan	Adanya target rencana yang tidak terpenuhi	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
5	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase pengawasan	Masih terjadinya temuan hasil	Risiko Kemitraan	Ketidaksesuaian antara dokumen	Penilaian kinerja konsultan rendah	Dinas PU Bina Marga dan Cipta

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		JALAN	dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	pengawasan eksternal		pendukung konsultan dan hasil pemeriksaan auditor		Karya
6	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	Lamanya proses sertifikasi hasil pengadaan lahan	Risiko Operasional	Proses validasi dan administrasi BPN	Menghambat pelaksanaan konstruksi	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
7	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	Tidak terpenuhinya standar geometrik dan struktur jalan berkeselamatan	Risiko Operasional	Kondisi topografi, kerawanan bencana dan umur rencana konstruksi sudah terlampaui	Rawan terjadi kecelakaan	Masyarakat pengguna jalan
8	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase panjang jalan	Tidak terpenuhinya	Risiko Operasional	Kondisi topografi, kerawanan bencana	Rawan terjadi kecelakaan	Masyarakat pengguna jalan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		JALAN	provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	standar geometrik dan struktur jalan berkeselamatan		dan umur rencana konstruksi sudah terlampaui		
9	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase akses air minum layak	Pembangunan infrastruktur akses layanan dasar air minum belum memadai	Risiko Operasional	Pembangunan akses layanan dasar air minum di Kabupaten/Kota belum menjadi prioritas.	Berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat	- Masyarakat - Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Provinsi
10	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase akses air minum jaringan perpipaan	Pembangunan infrastruktur akses layanan dasar air minum belum memadai	Risiko Operasional	Pembangunan akses layanan dasar air minum di Kabupaten/Kota belum menjadi prioritas.	Berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat	- Masyarakat - Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Provinsi
11	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui	Ketersediaan sumber air baku SPAM Regional tidak kontinyu	Risiko Operasional	Penurunan debit sumber air baku SPAM Regional akibat perubahan iklim	Kapasitas produksi air curah SPAM Regional tidak dapat memenuhi permintaan layanan	- Masyarakat - PDAM Offtaker - PT. TUJT - Dinas PUBMCK

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		MINUM	penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota					
12	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase akses air limbah domestik layak	Pembangunan infrastruktur akses layanan dasar air limbah domestik belum memadai	Risiko Operasional	Pembangunan akses layanan dasar air limbah domestik di Kabupaten/Kota belum menjadi prioritas.	Berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat	- Masyarakat - Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Provinsi
13	Sasaran Program	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggara	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) belum memenuhi	Risiko Kepatuhan	Penyelenggaraan BGMD tentang peraturan dan standar teknis Bangunan Gedung	Penyelenggaraan BGMD tidak dapat dimanfaatkan dan tidak berfungsi dengan maksimal	OPD Penyelenggara Bangunan Gedung Milik Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			an pembangunan bangunan gedung milik daerah	peraturan dan Standar Teknis Bangunan Gedung Negara		Negara kurang dipahami dengan baik oleh OPD penyelenggara BGMD		
14	Sasaran Program	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	Data teknis BGMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan belum sesuai dengan peraturan pelaksanaannya PP RI No. 16 Tahun 2021	Risiko Strategis	Keterbatasan alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena tersebarnya aset BGMD Provinsi Jawa Tengah di 35 Kabupaten/Kota dengan lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan	Data teknis BGMD belum terinventarisasi dengan baik	OPD Pemilik Aset BGMD di Pemprov Jateng
15	Sasaran Program	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase fasilitasi	Tidak adanya kontrol dan	Risiko Kepatuhan	Pelaku jasa konstruksi kurang	Banyak yang belum memahami secara	Masyarakat, Pengguna Jasa

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		JASA KONSTRUKSI	bidang jasa konstruksi	kewenangan terhadap pelaku jasa konstruksi		berminat untuk mempelajari peraturan jasa konstruksi	mendalam peraturan- peraturan baru mengenai peraturan jasa konstruksi	Konstruksi
16	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	Risiko Operasional	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Masyarakat Pengguna jalan
17	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	Kerusakan bagian-bagian jembatan	Risiko Operasional	Umur konstruksi jembatan yang sudah melampaui batas usia rencana	Kurang amannya masyarakat yang melewati jembatan	Masyarakat pengguna jalan
18	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	Tidak tercapainya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Pelaksanaan optimalnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			daerah	secara maksimal				
19	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	Risiko Operasional	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Masyarakat pengguna jalan
20	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	Kerusakan bagian-bagian jembatan	Risiko Operasional	Umur konstruksi jembatan yang sudah melampaui batas usia rencana	Kurang amannya masyarakat yang melewati jembatan	Masyarakat pengguna jembatan
21	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Tidak tercapainya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah secara maksimal	Risiko Operasional	Kurangnya optimalnya pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Pelaksanaan optimalnya operasional pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
22	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase panjang jalan	Kondisi permukaan jalan	Risiko Operasional	Penanganan tidak sesuai dengan	Jalan tidak aman dan nyaman bagi	Masyarakat Pengguna jalan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		JALAN	provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	yang cepat rusak		perencanaan teknis	pengguna jalan	
23	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	Kerusakan bagian-bagian jembatan	Risiko Operasional	Umur konstruksi jembatan yang sudah melampaui batas usia rencana	Kurang aman nya masyarakat yang melewati jembatan	Masyarakat pengguna jalan
24	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Tidak tercapainya pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah secara maksimal	Risiko Operasional	Kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Pelaksanaan operasional pelayanan umum kepegawaian dan keuangan lambat	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
25	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	Risiko Operasional	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Masyarakat Pengguna Jalan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			mantap di BPJ Wilayah Semarang					
26	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	Kerusakan bagian-bagian jembatan	Risiko Operasional	Umur konstruksi jembatan yang sudah melampaui batas usia rencana	Kurang amannya masyarakat yang melewati jembatan	Masyarakat pengguna jalan
27	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Tidak tercapainya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah secara maksimal	Risiko Operasional	Kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Pelaksanaan optimalnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
28	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	Kondisi Permukaan Jalan Cepat Rusak	Risiko Operasional	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Masyarakat pengguna jalan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
29	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	Kerusakan bagian - bagian jembatan	Risiko Operasional	Umur konstruksi jembatan yang melampaui batas usia rencana	Kurang amannya masyarakat yang melewati jembatan	Masyarakat pengguna jalan
30	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Tidak Tercapainya Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	Risiko Operasional	Kurang Optimalnya Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan optimalnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
31	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Kondisi Permukaan Jalan Cepat Rusak	Risiko Operasional	Penanganan Tidak Sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Masyarakat Pengguna Jalan
32	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jembatan	Kerusakan Bagian - Bagian jembatan	Risiko Operasional	Umur Konstruksi Jembatan yang sudah melampaui	Kurang amannya masyarakat yang melewati jembatan	Masyarakat pengguna jalan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo			usia rencana		
33	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Tidak tercapainya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah secara maksimal	Risiko Operasional	Kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Pelaksanaan optimalnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
34	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	Risiko Operasional	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Masyarakat pengguna jalan
35	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	Kerusakan bagian-bagian jembatan	Risiko Operasional	Umur konstruksi jembatan yang sudah melampaui usia rencana	Kurang amannya masyarakat yang melewati jembatan	Masyarakat pengguna jalan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Tidak tercapainya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah secara maksimal	Risiko Operasional	Kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Pelaksanaan optimalnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
37	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	Risiko Operasional	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan tidak nyaman bagi pengguna jalan	Masyarakat pengguna jalan
38	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	Kerusakan bagian-bagian jembatan	Risiko Operasional	Umur konstruksi jembatan yang sudah melampaui batas umur rencana jembatan	Kurang amannya masyarakat yang melewati jembatan	Masyarakat pengguna jalan
39	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase tingkat pelayanan	Tidak tercapainya pelayanan	Risiko Operasional	Kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan umum,	Pelaksanaan optimalnya pelayanan umum,	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah secara maksimal		kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Purwodadi
40	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	Risiko Operasional	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Masyarakat Pengguna jalan
41	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	kerusakan bagian-bagian jembatan	Risiko Operasional	Umur konstruksi jembatan yang sudah melampaui batas usia rencana	Kurang amannya masyarakat yang melewati jembatan	Masyarakat Pengguna jembatan
42	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	Tidak tercapainya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	Risiko Operasional	Kurangnya optimalnya pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	Pelaksanaan optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			perangkat daerah	perangkat daerah secara maksimal		perangkat daerah		
43	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamarga-an	Kerusakan peralatan dan alat berat pemeliharaan rutin	Risiko Operasional	Banyaknya peralatan kebinamargaan yang dimiliki sudah lama tahun perolehannya	Kurang optimalnya operasional peralatan dan alat berat dalam melaksanakan pemeliharaan rutin jalan serta menurunnya tingkat kepercayaan eksternal	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
44	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	Pemalsuan Sertifikat hasil pengujian mutu di Balai Pengujian dan Peralatan	Risiko Hukum	Sertifikat hasil pengujian dapat dirubah dengan mudah menggunakan teknologi komputer yang modern	Resiko pemalsuan sertifikat hasil uji berdampak pada kualitas pekerjaan di lapangan	Pemilik pekerjaan, masyarakat umum.
45	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	Alat-alat laboratorium membutuhkan pembaharuan untuk menunjang pengujian	Risiko Operasional	Kualitas alat uji lokal belum sesuai kebutuhan	Menghambat proses pengujian	Pengguna Layanan Pengujian

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				laboratorium yang lebih baik (Alat laboratorium kebanyakan barang import)				
46	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Tidak tercapainya prosentase pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Keterbatasan SDM yang memadai	Ketidaksesuaian program	Balai Pengujian dan Peralatan
47	Sasaran Program	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	Kurangnya minat masyarakat Jasa Konstruksi dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme	Risiko Operasional	Terbatasnya anggaran dari masyarakat dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme secara mandiri serta kurangnya akses masyarakat terhadap informasi program pengembangan	Tidak terpenuhinya jumlah peserta dalam program pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Masyarakat; Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jasa Konstruksi		
48	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Tidak tercapainya pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah secara maksimal	Risiko Operasional	Kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Penurunan nilai kinerja	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
C.	KEGIATAN							
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Kesalahan input data dalam aplikasi Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	Risiko Operasional	- Timeline perencanaan dan evaluasi tidak terinformasikan - Waktu input data pada aplikasi terbatas, sedangkan butuh waktu untuk mengkoordinasikan dengan bidang lainnya - inputer kurang teliti dalam input data	Ketidak sesuaian antara perencanaan dan evaluasi dan membutuhkan perbaikan ataupun pergeseran kedepannya	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen administrasi keuangan tidak lengkap dan tidak tepat waktu	Risiko Operasional	Keterbatasan SDM dan Sarpras yang kurang mendukung	Adanya temuan administrasi keuangan	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Barang milik daerah belum terasuransi	Risiko Operasional	Barang milik daerah yang sudah berusia tua tidak memenuhi syarat asuransi	Barang milik daerah tidak dapat terlindungi ketika terjadi musibah	Perangkat Daerah
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Kurangnya jumlah ASN yang mengikuti Diklat/workshop /seminar/Bintek	Risiko Operasional	Pemetaan kebutuhan diklat/workshop/seminar/ Bintek belum disusun	Pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai belum optimal	Perangkat Daerah
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase layanan administrasi	Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Risiko Operasional	- Pemakaian yang sudah melebihi jangka waktu	- Sarana prasarana tidak bisa digunakan secara maksimal dan	Perangkat Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	an Bangunan Kantor tidak tersedia sesuai dengan kebutuhan		pemakaian wajar - Tidak terawatnya komponen-komponen instalasi listrik - Tidak terprediksinya kerusakan komponen instalasi listrik	menyebabkan tugas kedinasan terhambat - Ketidaknyamanan pada lingkungan kerja	
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Terdapat keterlambatan maupun tidak tersedianya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Risiko Operasional	- Keterlambatan dalam pembelian barang - Tidak tersedianya stock barang - Tidak dilakukan pemeriksaan secara rutin - kelengkapan dokumen dalam penyusunan SPJ	- Sarana prasarana tidak bisa digunakan secara maksimal dan menyebabkan tugas kedinasan terhambat - Ketidaknyamanan pada lingkungan kerja	Perangkat Daerah
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat	Tidak tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Risiko Operasional	- Kelengkapan dokumen dalam penyusunan SPJ - Keterlambatan dalam pembelian	- Sarana prasarana tidak bisa digunakan secara maksimal dan menyebabkan tugas kedinasan terhambat	Perangkat Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			daerah yang sesuai standar layanan			Peralatan Rumah Tangga - Tidak adanya stok Peralatan Rumah Tangga	- Ketidaknyamanan pada lingkungan kerja	
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Tidak tersedianya kebutuhan logistik kantor barang cetakan dan penggandaan	Risiko Operasional	- Keterlambatan dalam pembelian barang cetak - Tidak terdapat stok barang untuk cadangan	- Sarana prasarana tidak bisa digunakan secara maksimal dan menyebabkan tugas kedinasan terhambat - Ketidaknyamanan pada lingkungan kerja	Perangkat Daerah
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Keterlambatan pembayaran dan tidak tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Risiko Operasional	- Kelengkapan dokumen SPJ - Tidak tersedianya regulasi cetak untuk Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Pegawai kurang mendapat informasi terbaru - Terbatasnya pengetahuan ASN terhadap informasi terkini yang menyebabkan terganggunya kelancaran tugas - Kebutuhan tentang pengetahuan baik teknis maupun	Perangkat Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							administrasi menjadi berkurang	
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pembatalan atau pengunduran jadwal pelaksanaan rapat	Risiko Operasional	Keterlambatan peserta dalam melaksanakan koordinasi	Tidak terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah sesuai dengan yang telah di tentukan	Perangkat Daerah
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Keterlambatan dalam Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Risiko Operasional	- Kelengkapan dokumen dalam penyusunan SPJ - Keterlambatan dalam Penatausahaan Arsip Dinamis	- Penatausahaan Arsip Dinamis tidak bisa digunakan secara maksimal dan menyebabkan tugas kedinasan terhambat - Ketidaknyamanan pada lingkungan kerja	Perangkat Daerah
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar	Keterlambatan dalam pembuatan laporan pelaksanaan SPBE	Risiko Operasional	Kurang cekatan dalam penyusunan laporan	Penyusunan laporan terjadi terlambat	Perangkat Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			layanan					
13	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Pengadaan Mebel yang diadakan belum sesuai spesifikasi	Risiko Operasional	Adanya kebijakan penggunaan produk dalam negeri	Mebel tidak dapat dioptimalkan	Perangkat Daerah
14	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan belum sesuai spesifikasi	Risiko Operasional	Adanya kebijakan penggunaan produk dalam negeri	Peralatan dan Mesin Lainnya tidak dapat dioptimalkan	Perangkat Daerah
15	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Pengadaan KDO atau Lapangan yang diadakan belum sesuai spesifikasi	Risiko Operasional	Adanya kebijakan penggunaan produk dalam negeri	KDO atau Lapangan tidak dapat dioptimalkan	Perangkat Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terjadi keterlambatan dalam pemenuhan pelayanan surat menyurat perangkat pemerintah daerah	Risiko Operasional	Pendistribusian naskah dinas tidak berjalan sesuai jadwal	Pelayanan dan pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal	Perangkat Daerah
17	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terjadi keterlambatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Risiko Operasional	Kurang lengkapnya dokumen dalam penyusunan SPJ	Pelayanan dan pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal	Perangkat Daerah
18	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang	Tidak terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	Risiko Operasional	Kurang lengkapnya dokumen dalam penyusunan SPJ	Pelayanan dan pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal	Perangkat Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			disusun					
19	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Tidak terpenuhinya biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Risiko Operasional	Persiapan kelengkapan dokumen dalam penyusunan SPJ tepat waktu dan lengkap	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Perangkat Daerah
20	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Tidak terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Risiko Operasional	Tidak terprediksinya kerusakan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kurang terawatnya inventarisasi Barang Milik Daerah dan pemakaian intensitas yang tinggi dan mengurangi tingkat kenyamanan	Perangkat Daerah
21	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah unit barang milik daerah penunjang	Tidak terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Risiko Operasional	Belum optimalnya pendataan/inventarisasi kondisi Sarana dan Prasarana	Kurang terawatnya inventarisasi Barang Milik Daerah dan pemakaian intensitas	Perangkat Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		DAERAH PROVINSI	urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang tinggi dan mengurangi tingkat kenyamanan	
22	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N	1. Pada lokasi tertentu, tidak ada data batas-batas tanah yang pasti 2. Belum semua data leger dalam bentuk digital	Risiko Operasional	1. Batas tanah jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Jalan belum semua bersertifikat 2. Dokumen leger masih manual	1. Pada lokasi tertentu, batas berdasarkan asumsi 2. Hilangnya data leger yang belum terdigitalisasi	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
23	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	Timbul perubahan lokasi dan lingkup pekerjaan	Risiko Operasional	Perubahan rencana penanganan jalan jangka menengah berdasarkan kondisi tahun berjalan	Adanya target rencana penanganan yang tidak terpenuhi atau jenis penanganan kurang sesuai dengan kebutuhan	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
24	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulang an bencana	Kurang terpenuhinya kompetensi personil konsultan pengawas	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman personil pengawasan terhadap pembaharuan	Kurang sesuai nya hasil pengawasan konsultan dengan pengguna jasa (Balai Pengelolaan Jalan/ Bidang Pelaksana	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			jalan dan jembatan			ketentuan dan peraturan standar penanganan jalan dan jembatan	jalan)	
25	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah	Hasil pengukuran dari BPN tidak sesuai dengan luasan yang sudah dibebaskan	Risiko Operasional	Terdapat perbedaan luasan	Pembangunan jembatan dan jalan terhambat sehingga tidak bisa segera dilaksanakan	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan/ Bidang Pelaksana/ Balai Pengelolaan Jalan
26	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah	Pengadaan tanah tidak sesuai rencana kebutuhan	Risiko Operasional	Penolakan Sebagian Warga Pemilik Lahan di Lokasi Pembebasan	Menghambat pelaksanaan pekerjaan konstruksi	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
27	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah	Pelaksanaan kegiatan rekonstruksi jalan Jepara-Keling mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah direncanakan	Risiko Operasional	1. Selesainya proses lelang tidak sesuai rencana 2. Kinerja penyedia jasa tidak sesuai kontrak	Tertundanya pelayanan masyarakat pada kegiatan rekonstruksi jalan Jepara-Keling	Masyarakat pengguna jalan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Timur					
28	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Pelaksanaan kegiatan rekonstruksi jalan Kuwuh-galeh mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah direncanakan	Risiko Operasional	1. Selesainya proses lelang tidak sesuai rencana 2. Kinerja penyedia jasa tidak sesuai kontrak	Tertundanya pelayanan masyarakat pada kegiatan rekonstruksi jalan Jepara-Keling	Masyarakat pengguna jalan
29	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Ketidaksesuaian volume pekerjaan yang dilaporkan dengan yang terpasang di lapangan	Risiko Fraud	Kurangnya pengawasan saat pekerjaan di lapangan	Kelebihan pembayaran/ kerugian negara	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
30	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Panjang Jalan Provinsi yang	Pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional	1. Selesainya proses pengadaan	Tertundanya pelayanan	Masyarakat Pengguna Jalan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		JALAN	Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	rekonstruksi jalan ruas Kutoarjo-Bruno mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah direncanakan		barang/jasa yang tidak sesuai rencana 2. Kinerja penyedia jasa tidak sesuai kontrak	masyarakat pada ruas jalan Kutoarjo - Bruno	
31	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Terjadinya gangguan lalu lintas barang dan jasa	Risiko Operasional	Penyempitan jalan untuk pekerjaan pelebaran jalan pada satu lajur	1. Kemacetan lalu lintas pada ruas jalan Kutoarjo - Bruno 2. Terganggunya distribusi barang dan jasa yang melewati ruas jalan Kutoarjo - Bruno	Masyarakat Pengguna Jalan
32	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Layak	Kurang optimalnya pengelolaan SPAM perdesaan dan perkotaan sehingga	Risiko Operasional	Belum optimalnya kapasitas Pengelola SPAM Perdesaan dan Perkotaan	Kurang optimalnya jumlah SR yang terlayani SPAM Perdesaan dan Perkotaan	Masyarakat dan Pemda terkait

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Th-N (Jiwa)	mengakibatkan kurang optimalnya jumlah penduduk yang sudah mengakses air minum layak				
33	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Layak Th-N (Jiwa)	Masih ada masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak	Risiko Operasional	Belum semua masyarakat memiliki akses air minum yang layak	Belum adanya perbaikan akses air minum layak	Masyarakat dan Pemda terkait
34	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jiwa)	Kurang optimalnya pengelolaan SPAM perdesaan dan perkotaan sehingga mengakibatkan kurang optimalnya jumlah penduduk yang	Risiko Operasional	Belum semua Masyarakat memiliki akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah SR yang terlayani air minum jaringan perpipaan di Jawa Tengah juga optimal	Masyarakat dan Pemda terkait

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				sudah mengakses air minum layak				
35	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jiwa)	Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum jaringan perpipaan	Risiko Operasional	Belum semua Masyarakat memiliki akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah SR yang terlayani air minum jaringan perpipaan di Jawa Tengah juga optimal	Masyarakat dan Pemda terkait
36	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota	Perijinan pembangunan JDU terhambat karena melibatkan banyak pihak	Risiko Operasional	Banyak pihak yang terlibat dalam perijinan pembebasan lahan atau ijin pemasangan pipa	Penerbitan ijin membutuhkan waktu yang cukup lama	Masyarakat dan Pemda terkait
37	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui	Metode pelaksanaan pekerjaan saat pembangunan kurang sesuai	Risiko Operasional	Saat perencanaan sudah lama	Metode pekerjaan kurang sesuai dengan kondisi lapangan saat ini	Masyarakat dan Pemda terkait

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		MINUM	Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota	kondisi lapangan saat ini				
38	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Penduduk yang Sudah Mempunyai Akses Air Limbah Domestik Layak Th-N	Penyediaan dan pengelolaan air limbah domestik kurang memadai	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik	pencemaran lingkungan	Masyarakat
39	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Lokasi Komplek BGMD yang Diberi Bantuan Teknis Pada Tahun N	Kegiatan penyelenggaraan BGMD tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan peraturan dan standar teknis yang berlaku	Risiko Operasional	OPD Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan BGMD kurang memahami peraturan dan standar teknis Bangunan Gedung Negara dengan baik	Penyelenggaraan BGMD belum memenuhi aspek tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib administrasi	OPD Penyelenggara Bangunan Gedung Milik Daerah
40	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah	Data teknis Bangunan Gedung Milik Daerah belum terhimpun	Risiko Operasional	Keterbatasan data teknis seperti gambar DED pada bangunan-bangunan lama,	Karena keterbatasan data teknis BGMD menyebabkan penanganan teknis terhadap kondisi	OPD Pemilik Aset BGMD di Pemprov Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			dilakukan pendataan teknis pada tahun n	dengan baik		data KRK yang sulit ditemui/ diakses, dan kondisi fisik bangunan	bangunan kurang optimal	
41	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kapasitas pelaku jasa konstruksi yang stagnan dan tidak berkembang	Risiko Strategis	Kurangnya kesadaran dan minat pelaku jasa konstruksi untuk ditingkatkan kapasitasnya	Personel tenaga ahli konstruksi tidak memenuhi kemampuan sesuai dengan yang dipersyaratkan	Pengguna Jasa Konstruksi, Masyarakat
42	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal	Kecelakaan kendaraan bermotor	Risiko Operasional	Kurangnya pemasangan rambu - rambu dan kondisi jalan yang memiliki topografi yang ekstrim	Komplain dari penduduk setempat	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; Masyarakat
43	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan volume kontrak dan spesifikasi teknis	Risiko Fraud	Terdapat indikasi KKN dalam proses pengadaan maupun pada waktu pelaksanaan kegiatan	Kualitas dan kuantitas pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	BPJ Wilayah Tegal ; Masyarakat
44	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Panjang Jembatan	Kemacetan lalu lintas pada saat	Risiko Operasional	Proses konstruksi yang memakai	Penyempitan jalan dan gangguan lalu	Balai Pengelolaan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		JALAN	Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Tegal	pelaksanaan kegiatan		sebagian lahan badan jembatan	lintas	Jalan Wilayah Tegal; Masyarakat
45	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban, mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran	Risiko Operasional	Pengelolaan Dokumen membutuhkan waktu dan proses sertanya kurangnya SDM yang memadai	terlambatnya penyampaian surat pertanggungjawaban dan SDM yang ada sering bekerja sampai dengan lebih dari batas jam kerja (lembur)	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
46	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Personil kurang memenuhi kualifikasi pekerjaan	Risiko Operasional	Terdapat personil keamanan dan kebersihan kurang cakap/tanggap dalam melaksanakan kegiatan	Kurang terjaganya keamanan dan kebersihan kantor	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
47	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah unit barang milik daerah penunjang	Kerusakan peralatan dan mesin milik kantor	Risiko Operasional	tidak tersedia suku cadang dipasaran	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		DAERAH PROVINSI	urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan				peralatan	
48	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	Kecelakaan kendaraan bermotor	Risiko Operasional	Kurangnya pemasangan rambu-rambu dan kondisi jalan yang memiliki topografi yang ekstrim	Komplain dari penduduk setempat	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; Masyarakat
49	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pekalongan	Kemacetan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional	Proses konstruksi yang memakai sebagian lahan badan jembatan	Penyempitan jalan dan gangguan lalu lintas	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; Masyarakat
50	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat	Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban,	Risiko Operasional	Pengelolaan dokumen membutuhkan waktu dan proses serta kurangnya	Terlambatnya penyampaian surat pertanggungjawaban dan SDM yang ada sering bekerja	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			daerah yang sesuai standar layanan	mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran		SDM yang memadai	sampai dengan lebih dari batas jam kerja (lembur)	
51	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Personil kurang memenuhi kualifikasi pekerjaan	Risiko Operasional	Terdapat personil keamanan dan kebersihan kurang cakap/tanggap dalam melaksanakan kegiatan	Kurang terjaganya keamanan dan kebersihan kantor	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
52	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kerusakan peralatan dan mesin milik kantor	Risiko Operasional	Tidak tersedianya suku cadang dipasaran	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan peralatan	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
53	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah unit barang milik daerah penunjang	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Risiko Fraud	Terdapat indikasi KKN dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan	Kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	BPJ Wilayah Pekalongan ; Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		DAERAH PROVINSI	urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan					
54	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap	Kecelakaan kendaraan bermotor	Risiko Operasional	Kurangnya pemasangan rambu - rambu dan kondisi jalan yang memiliki topografi yang ekstrim	Komplain dari penduduk setempat	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; Masyarakat
55	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap	Kemacetan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional	Proses konstruksi yang memakai sebagian lahan badan jembatan	Penyempitan jalan dan gangguan lalu lintas	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; Masyarakat
56	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan volume kontrak dan spesifikasi teknis	Risiko Fraud	Indikasi KKN dalam proses pengadaan maupun pada waktu pelaksanaan kegiatan	Kualitas dan kuantitas pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	BPJ Wilayah Cilacap ; Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			di BPJ Wilayah Cilacap					
57	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban, mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran	Risiko Operasional	Pengelolaan Dokumen membutuhkan waktu dan proses sertanya kurangnya SDM yang memadai	terlambatnya penyampaian surat pertanggung jawaban dan SDM yang ada sering bekerja sampai dengan lebih dari batas jam kerja (lembur)	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
58	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Personil kurang memenuhi kualifikasi pekerjaan	Risiko Operasional	Terdapat personil keamanan dan kebersihan kurang cakap/tanggap dalam melaksanakan kegiatan	Kurang terjaganya keamanan dan kebersihan kantor	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
59	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan	Kerusakan peralatan dan mesin milik kantor	Risiko Operasional	Tidak tersedia suku cadang dipasaran	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan peralatan	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap ; Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan					
60	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang	Kecelakaan kendaraan bermotor	Risiko Operasional	Kurangnya pemasangan rambu - rambu dan kondisi jalan yang memiliki topografi yang ekstrim	Komplain dari penduduk setempat	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; Masyarakat
61	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang	Ketidaksesuaian spesifikasi material yang di kontrak dengan di lapangan	Risiko Fraud	Kurang teliti dan kurang pengawasan terhadap material	Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang dan Pengguna Jalan
62	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ	Ketidaksesuaian volume pekerjaan yang dilaporkan dengan yang terpasang di lapangan	Risiko Fraud	Kurangnya pengawasan saat pekerjaan di lapangan	Kelebihan pembayaran/kerugian negara	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang dan Pengguna Jalan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Wilayah Semarang					
63	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang	Kemacetan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional	Proses konstruksi yang memakai sebagian lahan badan jembatan	Penyempitan jalan dan gangguan lalu lintas	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; Masyarakat
64	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang	Ketidaksesuaian spesifikasi material yang di kontrak dengan di lapangan	Risiko Fraud	Kurang teliti dan kurang pengawasan terhadap material	Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang dan Pengguna Jalan
65	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang	Ketidaksesuaian volume pekerjaan yang dilaporkan dengan yang terpasang di lapangan	Risiko Fraud	Kurangnya pengawasan saat pekerjaan di lapangan	Kelebihan pembayaran/kerugian negara	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang dan Pengguna Jalan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
66	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban, mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran	Risiko Operasional	Pengelolaan Dokumen membutuhkan waktu dan proses serta kurangnya SDM yang memadai	Terlambatnya penyampaian surat pertanggungjawaban dan SDM yang ada sering bekerja sampai dengan lebih dari batas jam kerja (lembur)	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
67	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Personil kurang memenuhi kualifikasi pekerjaan	Risiko Operasional	Terdapat personil keamanan dan kebersihan kurang cakap/tanggap dalam melaksanakan kegiatan	Kurang terjaganya keamanan dan kebersihan kantor	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
68	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan	Kerusakan peralatan dan mesin milik kantor	Risiko Operasional	Tidak tersedia suku cadang di pasaran	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan peralatan	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			pemeliharaan					
69	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang	Kecelakaan kendaraan bermotor	Risiko Operasional	Kurangnya pemasangan rambu - rambu dan kondisi jalan yang memiliki topografi yang ekstrim	Komplain dari penduduk setempat	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; Masyarakat
70	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Risiko Fraud	Terdapat indikasi KKN di dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kegiatan paket pekerjaan	Kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang dibuat	BPJ Wilayah Magelang ; Masyarakat
71	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang	Kemacetan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional	Proses konstruksi yang memakai sebagian lahan badan jembatan	Penyempitan jalan dan gangguan lalu lintas	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban, mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran	Risiko Operasional	Pengelolaan Dokumen membutuhkan waktu dan proses sertanya kurangnya SDM yang memadai	Terlambatnya penyampaian surat pertanggungjawaban dan SDM yang ada sering bekerja sampai dengan lebih dari batas jam kerja (lembur)	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
73	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Personil kurang memenuhi kualifikasi pekerjaan	Risiko Operasional	Terdapat personil keamanan dan kebersihan kurang cakap/tanggap dalam melaksanakan kegiatan	Kurang terjaganya keamanan dan kebersihan kantor	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
74	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Kerusakan peralatan dan mesin milik kantor	Risiko Operasional	Tidak tersedia suku cadang dipasaran	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan peralatan	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
75	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Risiko Operasional	Kurangnya Kualitas SDM	Tingkat Pelayanan Berkurang	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
76	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Tidak Tercapainya Kinerja Staf dan Personil	Risiko Operasional	Barang Milik Daerah Tidak Berfungsi dan Beroperasi Maksimal	Barang Milik Daerah Kurang Terpelihara	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
77	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Kecelakaan kendaraan bermotor	Risiko Operasional	Kurangnya pemasangan rambu - rambu dan kondisi jalan yang memiliki topografi yang ekstrim	Komplain dari penduduk setempat	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
78	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Hasil Pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi teknis	Risiko Fraud	Terdapat indikasi KKN dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan	Barang hasil pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
79	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo	Kemacetan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional	Proses konstruksi yang memakai sebagian lahan badan jembatan	Penyempitan jalan dan gangguan lalu lintas	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; Masyarakat
80	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban, mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran	Risiko Operasional	Pengelolaan Dokumen membutuhkan waktu dan proses sertanya kurangnya SDM yang memadai	terlambatnya penyampaian surat pertanggungjawaban dan SDM yang ada sering bekerja sampai dengan lebih dari batas jam kerja (lembur)	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
81	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Personil kurang memenuhi kualifikasi pekerjaan	Risiko Operasional	Terdapat personil keamanan dan kebersihan kurang cakap/tanggap dalam melaksanakan kegiatan	Kurang terjaganya keamanan dan kebersihan kantor	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
82	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kerusakan peralatan dan mesin milik kantor	Risiko Operasional	tidak tersedia suku cadang dipasaran	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan peralatan	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
83	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati	Kecelakaan kendaraan bermotor	Risiko Operasional	Kurangnya pemasangan rambu - rambu dan kondisi jalan yang memiliki topografi yang ekstrim	Komplain dari penduduk setempat	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati ; Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
84	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Risiko Fraud	Terdapat indikasi KKN dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan	Kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	BPJ Wilayah Pati ; Masyarakat
85	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati	Kemacetan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional	Proses konstruksi yang memakai sebagian lahan badan jembatan	Penyempitan jalan dan gangguan lalu lintas	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; Masyarakat
86	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban, mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran	Risiko Operasional	Pengelolaan Dokumen membutuhkan waktu dan proses sertanya kurangnya SDM yang memadai	Terlambatnya penyampaian surat pertanggungjawaban dan SDM yang ada sering bekerja sampai dengan lebih dari batas jam kerja (lembur)	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
87	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Jumlah laporan penyediaan	Personil kurang memenuhi kualifikasi	Risiko Operasional	Terdapat personil keamanan dan kebersihan kurang	Kurang terjaganya keamanan dan kebersihan kantor	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	pekerjaan		cakap/tanggap dalam melaksanakan kegiatan		Pati
88	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kerusakan peralatan dan mesin milik kantor	Risiko Operasional	Tidak tersedia suku cadang dipasaran	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan peralatan	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
89	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Kecelakaan kendaraan bermotor	Risiko Operasional	Kurangnya pemasangan rambu-rambu dan kondisi jalan yang memiliki topografi ekstrim	Komplain dari penduduk setempat	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; Masyarakat
90	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam	Putus kontrak	Risiko Operasional	Kualitas dan kuantitas tidak sesuai spesifikasi	Pekerjaan terlambat, hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak	BPJ Wil. Purwodadi, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi			teknis		
91	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Kerugian negara	Risiko Fraud	Terdapat indikasi KKN dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan	Kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	BPJ Wilayah Purwodadi ; Masyarakat
92	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi	Kemacetan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional	Proses konstruksi yang memakai sebagian lahan badan jembatan	Penyempitan jalan dan gangguan lalu lintas	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; Masyarakat
93	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik	Putus kontrak	Risiko Operasional	Kualitas dan kuantitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis	Pekerjaan terlambat, hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak	BPJ Wil. Purwodadi, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			di BPJ Wilayah Purwodadi					
94	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi	Jembatan dengan NK 3	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran sehingga hanya mampu menangani dengan pemeliharaan rutin, seharusnya dengan rehabilitasi jembatan. Contoh : Lantai Jembatan Pandanarum banyak lubang, penanganan : tambal lubang	Keamanan dan kenyamanan berkendara berkurang	BPJ Wilayah Purwodadi, Masyarakat
95	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran	Risiko Operasional	Pengelolaan dokumen membutuhkan waktu dan proses serta kurangnya SDM yang memadai	Terlambatnya penyampain surat pertanggungjawaban dan SDM yang bekerja sering bekerja sampai melebihi jam kerja (lembur)	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
96	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Personil kurang memenuhi kualifikasi pekerjaan	Risiko Operasional	Terdapat personil keamanan/kebersihan yang kurang cakap/tanggap dalam melaksanakan kegiatan	Kurang terjaganya keamanan dan kebersihan kantor	BPJ Wilayah Purwodadi
97	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kontrak mundur	Risiko Operasional	Redesign	Progress pekerjaan minus	BPJ Wilayah Purwodadi
98	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan	Kerusakan peralatan dan mesin milik kantor	Risiko Operasional	Tidak tersedia suku cadang di pasaran	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan rutin peralatan	BPJ Wilayah Purwodadi

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			pemeliharaan					
99	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Kecelakaan kendaraan bermotor	Risiko Operasional	Kurangnya pemasangan rambu-rambu dan kondisi jalan yang memiliki topografi yang ekstrim	Komplain dari penduduk setempat	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta; Masyarakat
100	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta	Kemacetan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional	Proses konstruksi yang memakai sebagian lahan badan jembatan	Penyempitan jalan dan gangguan lalu lintas	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta; Masyarakat
101	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban, mengakibatkan terlambatnya proses	Risiko Operasional	Pengelolaan dokumen membutuhkan waktu dan proses serta kurangnya SDM yang memadai	Terlambatnya penyampaian surat pertanggung jawaban dan SDM yang ada sering bekerja sampai dengan lebih dari batas jam kerja (lembur)	BPJ Wilayah Surakarta

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				pembayaran				
102	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Personil kurang memenuhi kualifikasi pekerjaan	Risiko Operasional	Terdapat personil keamanan dan kebersihan kurang cakap/tanggap dalam melaksanakan kegiatan	Kurang terjaganya keamanan dan kebersihan kantor	BPJ Wilayah Surakarta
103	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kerusakan peralatan dan mesin milik kantor	Risiko Operasional	Tidak tersedia suku cadang dipasaran	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan peralatan	BPJ Wilayah Surakarta
104	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Tersedia	Kerusakan peralatan kebinamargaan dan pemeliharaan rutin	Risiko Operasional	Banyaknya peralatan kebinamargaan yang dimiliki sudah lama tahun perolehannya	Kurang optimalnya operasional peralatan dan alat berat dalam melaksanakan pemeliharaan rutin	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							jalan serta menurunnya tingkat kepercayaan eksternal	
105	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi	Pemalsuan Sertifikat hasil uji	Risiko Operasional	Pengecekan terhadap keaslian sertifikat hasil uji belum terealisasi dengan merata.	kualitas pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan	pemilik pekerjaan dan masyarakat umum
106	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi	Alat-alat laboratorium membutuhkan pembaharuan untuk menunjang pengujian laboratorium yang lebih baik	Risiko Operasional	Alat-alat laboratorium yang ada lebih banyak produksi luar negeri (Barang Import)	Lamanya proses pengadaan alat laboratorium karena menunggu ijin pengadaan alat	Pengguna Layanan Pegujian
107	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Tidak terlayannya administrasi umum perangkat daerah	Risiko Operasional	Kurangnya kualitas SDM dan Kuantitas SDM	Laporan Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Terlambat	Balai Pengujian dan Perlatan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
108	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Risiko Operasional	Perencanaan Penganggaran Kurang Sesuai	Kantor Kurang Terpelihara	Balai Pengujian dan Peralatan
109	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Tidak Terpenuhinya Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Risiko Operasional	Perencanaan Penganggaran Kurang Sesuai	Barang Milik Daerah Kurang Terpelihara	Balai Pengujian dan Peralatan
110	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah Tenaga Bidang Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi	Gagalnya peserta memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)	Risiko Operasional	Kurangnya kompetensi teknis dan komitmen peserta dalam pelaksanaan kegiatan	Tidak terpenuhinya capaian jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; Masyarakat
111	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGEMBANGAN	Jumlah Penyelenggara	Kurang aktifnya pengelolaan	Risiko Operasional	Kurangnya kapasitas SDM	Tidak terupdatenya informasi Jasa	Dinas PU Bina Marga dan Cipta

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		JASA KONSTRUKSI	an Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah oleh administrator daerah		administrator daerah dalam melakukan pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Karya Provinsi Jawa Tengah; Masyarakat
112	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi	Tidak lengkapnya hasil isian form SIMAK Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi oleh objek pengawasan baik Badan Usaha Jasa Konstruksi, pengguna jasa,	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman objek pengawasan terhadap tata cara pengisian form SIMAK Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Kurang lengkapnya data pendukung dan kualitas laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya; Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				penyedia jasa maupun pengelola bangunan gedung				
113	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban	Risiko Operasional	Pengolahan dokumen membutuhkan waktu dan proses serta kurangnya SDM yang memadai	Keterlambatan target penyerapan keuangan	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
114	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Personil keamanan dan kebersihan kurang berkompeten	Risiko Operasional	Kurangnya ketelitian dalam proses pengadaan penyedia jasa keamanan dan kebersihan	Kurang terjaganya keamanan dan kebersihan kantor	Balai Jasa Konstruksi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
115	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah unit barang milik daerah penunjang	Keterlambatan progres pekerjaan rehabilitasi	Risiko Operasional	'Kurang intensnya pengawasan terhadap pekerjaan dan terbatasnya	Gedung kantor tidak dapat dipergunakan tepat waktu	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		DAERAH PROVINSI	urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	gedung kantor		SDM teknis		

b. Analisis Risiko

Tabel 2
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SASARAN									
Ketersediaan infrastruktur jaringan jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan	4	4	16	Ada	Peningkatan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor	Belum Memadai	4	4	16
Kerusakan jalan diluar perencanaan	4	4	16	Ada	Bekerja sama dengan pihak terkait dalam pembatasan muatan yang melintas, penertiban	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					aturan terkait ODOL dan Optimalisasi pemeliharaan rutin jalan				
Kerusakan jembatan diluar perencanaan	3	3	9	Ada	Melakukan perbaikan pada bagian jembatan yang sudah terindikasi rusak, supaya dapat meminimalisir kerusakan yang lebih berat	Memadai	3	2	6
Kurang sesuaiya risiko yang diidentifikasi dengan kondisi yang ada.	3	3	9	Ada	Mengevaluasi hasil identifikasi risiko bersama unit pemilik risiko	Memadai	3	2	6
Pelaksanaan pelayanan tidak sesuai ketentuan dan tidak tepat waktu	3	3	9	Ada	Pemasangan informasi alur pelayanan sesuai SOP dan sosialisasi SOP pelayanan publik ke seluruh pegawai yang ada	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Masih terdapatnya kompleks Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dengan kondisi fisik yang kurang berfungsi sesuai standar	3	3	9	Ada	Mengevaluasi kondisi kompleks BGMD sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk Bantuan Teknis	Memadai	3	2	6
Sambungan Rumah (SR) Layanan PDAM Kabupaten/Kota Offtaker SPAM Regional belum sepenuhnya terbangun	4	2	8	Ada	Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi secara seksama mengacu Perjanjian Kerjasama (membutuhkan waktu untuk penyelesaian risiko)	Belum Memadai	4	2	8
Capaian Akses Jaringan Perpipaan di Kabupaten/Kota masih rendah	4	3	12	Ada	Pembangunan SPAM Desa di alokasikan untuk Penanganan Kemiskinan dan Stunting	Memadai	3	2	6
Rendahnya penyedotan lumpur tinja untuk di olah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	4	4	16	Ada	Bimbingan teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan Monitoring	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Evaluasi sarpras air limbah domestik				
PROGRAM									
Perencanaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disusun tidak sesuai perencanaan	3	3	9	Ada	1. Sosialisasi evaluasi dalam proses perencanaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja 2. Rapat pengendalian operasional kegiatan (POK) 3. Peningkatan kapasitas SDM (bimtek dan diklat)	Memadai	2	3	6
Pelaksanaan pelayanan tidak sesuai ketentuan dan tidak tepat waktu	3	3	9	Ada	Koordinasi intern dalam rangka Pembagian tugas berdasarkan tupoksi	Memadai	3	2	6
1. Kurangnya dokumen pendukung kepemilikan lahan terkait batas wilayah untuk penyelenggaraan jalan 2. Kurangnya dokumen sekunder terkait perencanaan	4	3	12	Ada	Melaksanakan kegiatan leger jalan	Belum Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
desain									
Masih terjadinya reuiu desain	3	3	9	Ada	Pemrograman penganggaran pada Renstra dan Renja disesuaikan dengan Prioritas dengan mempertimbangkan Readiness Criteria yang sudah lengkap (DED, Pembebasan lahan, Dokling, Rekomtek)	Memadai	2	2	4
Masih terjadinya temuan hasil pengawasan eksternal	3	4	12	Ada	Pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja konsultan.	Belum Memadai	3	4	12
Lamanya proses sertifikasi hasil pengadaan lahan	2	5	10	Ada	Percepatan proses sertifikasi melalui koordinasi dengan BPN	Memadai	1	4	4
Tidak terpenuhinya standar geometrik dan struktur jalan berkeselamatan	5	5	25	Ada	Memberikan peringatan dan rekayasa lalulintas serta koordinasi dengan stakeholder terkait	Belum Memadai	5	5	25

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak terpenuhinya standar geometrik dan struktur jalan berkeselamatan	5	4	20	Ada	Memberikan peringatan dan rekayasa lalu lintas serta koordinasi dengan stakeholder terkait	Belum Memadai	5	3	15
Pembangunan infrastruktur akses layanan dasar air minum belum memadai	4	3	12	Ada	- Bintek SPAM Perdesaan dan Perkotaan untuk capaian akses air minum layak kepada OPD Pemerintah Kabupaten/ Kota - Ikut serta dalam meningkatkan capaian akses air minum layak perdesaan melalui Pembangunan SPAM Desa	Memadai	3	2	6
Pembangunan infrastruktur akses layanan dasar air minum belum memadai	4	3	12	Ada	- Bintek SPAM Perdesaan dan Perkotaan untuk capaian akses air minum jaringan perpipaan kepada	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					OPD Pemerintah Kabupaten/ Kota - Ikut serta dalam meningkatkan capaian akses air minum jaringan perpipaan melalui Pembangunan SPAM Regional dan SPAM Desa				
Ketersediaan sumber air baku SPAM Regional tidak kontinyu	3	4	12	Ada	Koordinasi pembagian pemanfaatan air baik sisi hulu maupun hilir bersama PT. TUJT	Belum Memadai	3	4	12
Pembangunan infrastruktur akses layanan dasar air limbah domestik belum memadai	4	4	16	Ada	Bimbingan teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan Monitoring Evaluasi sarpras air limbah domestik	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) belum memenuhi peraturan dan Standar Teknis Bangunan Gedung Negara	3	3	9	Ada	Bimbingan teknis, Sosialisasi dan Bantuan Teknis kepada OPD Penyelenggara BGMD yang dilakukan rutin setiap tahunnya	Memadai	2	2	4
Data teknis BGMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan belum sesuai dengan peraturan pelaksanaannya PP RI No. 16 Tahun 2021	3	1	3	Ada	Digitalisasi data teknis BGMD yang diterapkan secara bertahap sesuai skala prioritas	Memadai	2	1	2
Tidak adanya kontrol dan kewenangan terhadap pelaku jasa konstruksi	2	3	6	Ada	melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kondisi permukaan jalan cepat rusak	4	4	16	Ada	Pemeliharaan rutin jalan dengan pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC)	Belum Memadai	4	4	16
Kerusakan bagian-bagian jembatan	3	3	9	Ada	Pemeliharaan rutin jembatan	Memadai	3	2	6
Tidak tercapainya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah secara maksimal	3	3	9	Ada	Melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Belum Memadai	3	2	6
Kondisi permukaan jalan cepat rusak	4	4	16	Ada	Pemeliharaan rutin jalan dengan pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC)	Belum Memadai	4	4	16
Kerusakan bagian-bagian jembatan	3	3	9	Ada	Pemeliharaan rutin jembatan	Belum Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak tercapainya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah secara maksimal	3	2	6	Ada	Melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Belum Memadai	3	2	6
Kondisi permukaan jalan yang cepat rusak	4	4	16	Ada	Pemeliharaan rutin jalan dan pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC)	Belum Memadai	4	4	16
Kerusakan bagian-bagian jembatan	3	3	9	Ada	Pemeliharaan rutin jembatan	Memadai	3	2	6
Tidak tercapainya pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah secara maksimal	3	3	9	Ada	Melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kondisi permukaan jalan cepat rusak	4	4	16	Ada	Pemeliharaan Rutin Jalan dengan pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC)	Belum Memadai	4	4	16
Kerusakan bagian-bagian jembatan	3	3	9	Ada	Pemeliharaan rutin jembatan	Memadai	3	2	6
Tidak tercapainya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah secara maksimal	3	2	6	Ada	Melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Belum Memadai	3	2	6
Kondisi Permukaan Jalan Cepat Rusak	4	4	16	Ada	Pemeliharaan rutin jalan dengan pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC)	Belum Memadai	4	4	16
Kerusakan bagian - bagian jembatan	3	3	9	Ada	Pemeliharaan rutin jembatan	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak Tercapainya Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	3	2	6	Ada	Melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Belum Memadai	3	2	6
Kondisi Permukaan Jalan Cepat Rusak	4	4	16	Ada	Pemeliharaan rutin jalan dengan pembetulan Unit Reaksi Cepat (URC)	Belum Memadai	4	4	16
Kerusakan Bagian - Bagian jembatan	3	3	9	Ada	Pemeliharaan rutin jembatan	Memadai	3	2	6
Tidak tercapainya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah secara maksimal	3	2	6	Ada	Melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Belum Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kondisi permukaan jalan cepat rusak	4	4	16	Ada	Pemeliharaan rutin jalan dengan pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC)	Belum Memadai	4	4	16
Kerusakan bagian-bagian jembatan	3	3	9	Ada	Pemeliharaan rutin jembatan	Memadai	3	2	6
Tidak tercapainya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah secara maksimal	3	2	6	Ada	Melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Belum Memadai	3	2	6
Kondisi permukaan jalan cepat rusak	4	4	16	Ada	Pemeliharaan rutin jalan dengan Unit Reaksi Cepat (URC)	Belum Memadai	4	4	16
Kerusakan bagian-bagian jembatan	3	3	9	Ada	Pemeliharaan rutin jembatan	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak tercapainya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah secara maksimal	3	3	9	Ada	Melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Belum Memadai	3	2	6
Kondisi permukaan jalan cepat rusak	4	4	16	Ada	Pemeliharaan rutin jalan dengan pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC)	Belum Memadai	4	4	16
kerusakan bagian-bagian jembatan	3	3	9	Ada	Pemeliharaan rutin jembatan	Memadai	3	2	6
Tidak tercapainya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah secara maksimal	3	2	6	Ada	Melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Belum Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kerusakan peralatan dan alat berat pemeliharaan rutin	4	3	12	Ada	Mengoptimalkan pemeliharaan rutin dan berkala peralatan dan alat berat pemeliharaan	Belum Memadai	4	3	12
Pemalsuan Sertifikat hasil pengujian mutu di Balai Pengujian dan Peralatan	3	3	9	Ada	Pemberian barcode pada sertifikat hasil uji	Memadai	3	3	9
Alat-alat laboratorium membutuhkan pembaharuan untuk menunjang pengujian laboratorium yang lebih baik (Alat laboratorium kebanyakan barang import)	2	2	4	Ada	Sering melakukan checking dan kalibrasi alat uji	Memadai	2	2	4
Tidak tercapainya prosentase pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	3	3	9	Ada	Memaksimalkan SDM yang ada dan melakukan pendampingan	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kurangnya minat masyarakat Jasa Konstruksi dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme	4	3	12	Ada	Publikasi program pengembangan Jasa Konstruksi melalui berbagai media; Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan unsur-unsur kelembagaan jasa konstruksi baik unsur pemerintah maupun non pemerintah, termasuk asosiasi badan usaha, dan asosiasi profesi sektor konstruksi dalam pelaksanaan program dan rekrutmen peserta kegiatan serta peningkatan publikasi pelaksanaan program	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak tercapainya pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah secara maksimal	3	2	6	Ada	Proses perencanaan dan pelaksanaan selalu berkoordinasi antara Kepala Balai, PPTK, dan Kasubag TU; Melaksanakan evaluasi internal rutin berkala dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Belum Memadai	3	2	6
KEGIATAN									
Kesalahan input data dalam aplikasi Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	2	3	6	Ada	1. Melakukan double check hasil inputan di aplikasi dan mengkonfirmasi ulang kepada bidang-bidang 2. Rapat Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan evaluasi	Memadai	2	2	4
Dokumen administrasi	2	3	6	Ada	1. Koordinasi	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
keuangan tidak lengkap dan tidak tepat waktu					penggunaan aplikasi e-penatausahaan 2. Rekonsiliasi SPJ/keuangan dan pajak 3. Mengikutsertakan pegawai untuk sosialisasi/bimtek/p elatihan penyusunan laporan keuangan				
Barang milik daerah belum terasuransi	4	2	8	Ada	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder pengelolaan barang milik daerah	Memadai	2	2	4
Kurangnya jumlah ASN yang mengikuti Diklat/workshop/seminar/Bi ntek	2	2	4	Ada	Meningkatkan koordinasi antar sektor terkait diklat/workshop/se minar	Memadai	2	1	2
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak tersedia sesuai dengan kebutuhan	2	2	4	Ada	Melakukan pendataan terkait komponen yang akan melebihi batas waktu pemakaian	Memadai	2	1	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terdapat keterlambatan maupun tidak tersedianya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	2	4	Ada	Melakukan pendataan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Memadai	2	1	2
Tidak tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2	2	4	Ada	Melakukan pendataan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Memadai	2	1	2
Tidak tersedianya kebutuhan logistik kantor barang cetakan dan penggandaan	2	2	4	Ada	Melakukan pendataan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memadai	2	1	2
Keterlambatan pembayaran dan tidak tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	2	4	Ada	- Melakukan inventarisasi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Persiapan kelengkapan dokumen dalam penyusunan SPJ tepat waktu dan lengkap	Memadai	2	1	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pembatalan atau pengunduran jadwal pelaksanaan rapat	2	2	4	Ada	- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait - Memberikan informasi terkait jadwal pelaksanaan koordinasi	Memadai	2	1	2
Keterlambatan dalam Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	2	4	Ada	- Persiapan kelengkapan dokumen dalam penyusunan SPJ tepat waktu dan lengkap - Menyusun jadwal perencanaan Penatausahaan Arsip Dinamis	Memadai	2	1	2
Keterlambatan dalam pembuatan laporan pelaksanaan SPBE	2	2	4	Ada	Persiapan kelengkapan dokumen pelaporan	Memadai	2	1	2
Pengadaan Mebel yang diadakan belum sesuai spesifikasi	2	4	8	Ada	Meningkatkan koordinasi antar sektor terkait pengadaan mebel	Memadai	2	2	4
Pengadaan Peralatan dan	2	4	8	Ada	Meningkatkan	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mesin Lainnya yang diadakan belum sesuai spesifikasi					koordinasi antar sektor terkait pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Pengadaan KDO atau Lapangan yang diadakan belum sesuai spesifikasi	2	4	8	Ada	Meningkatkan koordinasi antar sektor terkait pengadaan KDO atau Lapangan	Memadai	2	2	4
Terjadi keterlambatan dalam pemenuhan pelayanan surat menyurat perangkat pemerintah daerah	2	2	4	Ada	Persiapan kelengkapan dokumen pelaporan	Memadai	2	1	2
Terjadi keterlambatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	2	4	Ada	Persiapan kelengkapan dokumen dalam penyusunan SPJ tepat waktu dan lengkap	Memadai	2	1	2
Tidak terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	2	2	4	Ada	Persiapan kelengkapan dokumen dalam penyusunan SPJ tepat waktu dan lengkap	Memadai	2	1	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak terpenuhinya biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	2	4	Ada	Lebih mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk penyusunan SPJ lebih awal dan update	Memadai	2	1	2
Tidak terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2	4	Ada	Persiapan kelengkapan dokumen dalam penyusunan SPJ tepat waktu dan lengkap	Memadai	2	1	2
Tidak terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	2	4	Ada	Persiapan kelengkapan dokumen dalam penyusunan SPJ tepat waktu dan lengkap	Memadai	2	1	2
1. Pada lokasi tertentu, tidak ada data batas-batas tanah yang pasti 2. Belum semua data leger dalam bentuk digital	3	3	9	Ada	1. Menggunakan asumsi sesuai dengan aturan dan atau kondisi di lapangan 2. Melakukan digitalisasi data leger	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Timbul perubahan lokasi dan lingkup pekerjaan	3	3	9	Ada	Membuat evaluasi perencanaan terhadap ruas yang sudah direncanakan	Memadai	2	2	4
Kurang terpenuhinya kompetensi personil konsultan pengawas	3	4	12	Ada	Pelaksanaan assement sebagai uji kompetensi dan penyelenggaraan workshop untuk peningkatan kompetensi personil	Memadai	2	4	8
Hasil pengukuran dari BPN tidak sesuai dengan luasan yang sudah dibebaskan	2	4	8	Ada	Pengukuran ulang sesuai Peta Bidang BPN dan Percepatan proses splitsing segera setelah pembebasan lahan dilaksanakan	Memadai	2	3	6
Pengadaan tanah tidak sesuai rencana kebutuhan	2	4	8	Ada	Pendekatan kepada warga yang menolak pengadaan tanah dan melibatkan pihak terkait (Pemerintah setempat)	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pelaksanaan kegiatan rekonstruksi jalan Jepara-Keling mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah direncanakan	3	4	12	Ada	1. Penguataan PCM pada kegiatan rekonstruksi jalan Jepara-Keling 2. Rapat evaluasi dan monitoring	Memadai	2	3	6
Pelaksanaan kegiatan rekonstruksi jalan Kuwu-Galeh mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah direncanakan	3	4	12	Ada	1. Penguataan PCM pada kegiatan rekonstruksi jalan Jepara-Keling 2. Rapat evaluasi dan monitoring	Memadai	2	3	6
Ketidaksesuaian volume pekerjaan yang dilaporkan dengan yang terpasang di lapangan	2	5	10	Ada	Memperketat pengawasan pelaksanaan di lapangan	Memadai	1	4	4
Pelaksanaan kegiatan rekonstruksi jalan ruas Kutoarjo-Bruno mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah direncanakan	2	4	8	Ada	1. Penekanan dokumen kontrak dalam Pre Construction Meeting (PCM) pada paket : Peningkatan Jalan Kutoarjo - Bruno 2. Rapat evaluasi dan monitoring	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					pelaksanaan pekerjaan secara periodik				
Terjadinya gangguan lalu lintas barang dan jasa	3	4	12	Ada	1. Pemasangan rambu-rambu pengatur lalu lintas 2. Penyediaan petugas pengatur lalu lintas 3. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait	Memadai	2	3	6
Kurang optimalnya pengelolaan SPAM perdesaan dan perkotaan sehingga mengakibatkan kurang optimalnya jumlah penduduk yang sudah mengakses air minum layak	2	3	6	Ada	Bintek SPAM Perdesaan dan Perkotaan untuk meningkatkan capaian akses air minum layak kepada OPD Pemerintah Kabupaten/ Kota	Memadai	2	2	4
Masih ada masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak	2	3	6	Ada	Pelaksanaan Pembangunan SPAM Desa di Provinsi Jawa Tengah TA. 2024	Memadai	2	2	4
Kurang optimalnya	3	3	9	Ada	Pembinaan Teknis	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
pengelolaan SPAM perdesaan dan perkotaan sehingga mengakibatkan kurang optimalnya jumlah penduduk yang sudah mengakses air minum layak					SPAM Perdesaan dan SPAM Perkotaan				
Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum jaringan perpipaan	3	3	9	Ada	Ikut serta dalam meningkatkan capaian akses air minum jaringan perpipaan melalui Pembangunan SPAM Desa	Memadai	2	2	4
Perijinan pembangunan JDU terhambat karena melibatkan banyak pihak	3	3	9	Ada	Melakukan proses perijinan sejak sebelum mulai dilaksanakan pekerjaan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait	Memadai	2	2	4
Metode pelaksanaan pekerjaan saat pembangunan kurang sesuai kondisi lapangan saat ini	3	3	9	Ada	Review dokumen perencanaan sebelum melakukan lelang, melakukan addendum pekerjaan	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyediaan dan pengelolaan air limbah domestik kurang memadai	3	4	12	Ada	Bimbingan teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan Monitoring Evaluasi sarpras air limbah domestik	Memadai	2	3	6
Kegiatan penyelenggaraan BGMD tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan peraturan dan standar teknis yang berlaku	3	3	9	Ada	Penugasan personil teknis bangunan gedung yang memberi masukan teknis di dalam bidang administrasi teknis kepada OPD Provinsi Jawa Tengah yang sedang menyelenggarakan BGMD	Memadai	2	2	4
Data teknis Bangunan Gedung Milik Daerah belum terhimpun dengan baik	3	1	3	Ada	melakukan pendataan teknis BGMD Prov. Jateng melalui pengamatan terhadap kondisi fisik bangunan	Memadai	2	1	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					gedung				
Kapasitas pelaku jasa konstruksi yang stagnan dan tidak berkembang	2	2	4	Ada	Sosialisasi, Rakor Tim Pembina Jasa Konstruksi, dan Forum Jasa Konstruksi Daerah	Memadai	2	1	2
Kecelakaan kendaraan bermotor	3	3	9	Ada	Pemeliharaan Rutin Jalan dan pemasangan rambu jalan	Memadai	3	2	6
Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan volume kontrak dan spesifikasi teknis	3	3	9	Ada	Melakukan proses pengadaan lewat e-tendering dan e-purchasing ; melakukan pengawasan pekerjaan dengan benar ; melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan teliti ; tertib dalam administrasi proyek	Memadai	2	3	6
Kemacetan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan	3	3	9	Ada	Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Pengaturan	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Manajemen Lalu Lintas				
Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban, mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran	2	2	4	Ada	Memaksimalkan potensi SDM yang ada dan pembuatan checklist dalam pengelolaan dokumen	Belum Memadai	3	2	6
Personil kurang memenuhi kualifikasi pekerjaan	3	3	9	Ada	Melakukan seleksi pemilihan penyedia jasa yang kompeten serta resume pekerjaan	Memadai	2	3	6
Kerusakan peralatan dan mesin milik kantor	3	3	9	Ada	Mitigasi kerusakan dengan servis secara rutin dan pemilihan penyedia melalui e-Katalog	Memadai	2	3	6
Kecelakaan kendaraan bermotor	3	3	9	Ada	Pemeliharaan rutin jalan dan pemasangan rambu jalan	Memadai	3	2	6
Kemacetan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan	3	3	9	Ada	Pemasangan rambu lalu lintas dan pengaturan	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					manajemen lalu lintas				
Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban, mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran	3	3	9	Ada	Memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan pembuatan checklist dalam pengelolaan dokumen	Belum Memadai	3	2	6
Personil kurang memenuhi kualifikasi pekerjaan	3	3	9	Ada	Melakukan seleksi pemilihan penyedia jasa yang kompeten serta resume pekerjaan	Memadai	2	3	6
Kerusakan peralatan dan mesin milik kantor	3	3	9	Ada	Mitigasi kerusakan dengan service secara rutin dan pemilihan penyedia melalui e-katalog	Memadai	2	3	6
Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	3	5	15	Ada	Melakukan pengawasan pekerjaan dengan benar, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					teliti dan pemeriksaan administrasi proyek				
Kecelakaan kendaraan bermotor	3	3	9	Ada	Pemeliharaan Rutin Jalan dan pemasangan rambu jalan	Memadai	3	2	6
Kemacetan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan	3	3	9	Ada	Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Pengaturan Manajemen Lalu Lintas	Memadai	2	3	6
Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan volume kontrak dan spesifikasi teknis	2	4	8	Ada	Melakukan proses pengadaan lewat e-tendering dan e-purchasing ; melakukan pengawasan pekerjaan dengan benar ; melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan teliti ; tertib dalam administrasi proyek	Memadai	1	3	3
Keterlambatan pengumpulan	3	3	9	Ada	Memaksimalkan	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
dokumen pertanggungjawaban, mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran					potensi SDM yang ada dan pembuatan checklist dalam pengelolaan dokumen				
Personil kurang memenuhi kualifikasi pekerjaan	3	3	9	Ada	Melakukan seleksi pemilihan penyedia jasa yang kompeten serta resume pekerjaan	Memadai	2	3	6
Kerusakan peralatan dan mesin milik kantor	3	3	9	Ada	Mitigasi kerusakan dengan servis secara rutin dan pemilihan penyedia melalui e-Katalog	Memadai	2	3	6
Kecelakaan kendaraan bermotor	3	3	9	Ada	Pemeliharaan Rutin Jalan dan pemasangan rambu jalan	Memadai	3	2	6
Ketidaksesuaian spesifikasi material yang di kontrak dengan di lapangan	3	5	15	Ada	Melakukan pengawasan pekerjaan	Memadai	3	4	12
Ketidaksesuaian volume pekerjaan yang dilaporkan dengan yang terpasang di	3	5	15	Ada	Melakukan pengawasan pekerjaan	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
lapangan									
Kemacetan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan	3	3	9	Ada	Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Pengaturan Manajemen Lalu Lintas	Memadai	2	3	6
Ketidaksesuaian spesifikasi material yang di kontrak dengan di lapangan	3	5	15	Ada	Melakukan pengawasan pekerjaan	Memadai	3	4	12
Ketidaksesuaian volume pekerjaan yang dilaporkan dengan yang terpasang di lapangan	3	5	15	Ada	Melakukan pengawasan pekerjaan	Memadai	3	4	12
Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban, mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran	3	3	9	Ada	Memaksimalkan potensi SDM yang ada dan pembuatan checklist dalam pengelolaan dokumen	Belum Memadai	3	2	6
Personil kurang memenuhi kualifikasi pekerjaan	3	3	9	Ada	Melakukan seleksi pemilihan penyedia jasa yang kompeten serta resume pekerjaan	Memadai	2	3	6
Kerusakan peralatan dan	3	3	9	Ada	Mitigasi kerusakan	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
mesin milik kantor					dengan servis secara rutin dan pemilihan penyedia melalui e-Katalog				
Kecelakaan kendaraan bermotor	3	3	9	Ada	Pemeliharaan Rutin Jalan dan pemasangan rambu jalan	Memadai	3	2	6
Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	3	4	12	Ada	Melakukan proses pengadaan melalui e-tenderin dan e-purchasing; Melakukan pengawasan pekerjaan dengan benar; Melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan teliti; Tertib dalam administrasi	Memadai	3	3	9
Kemacetan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan	3	3	9	Ada	Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Pengaturan Manajemen Lalu Lintas	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban, mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran	3	3	9	Ada	Memaksimalkan potensi SDM yang ada dan pembuatan checklist dalam pengelolaan dokumen	Belum Memadai	3	2	6
Personil kurang memenuhi kualifikasi pekerjaan	3	3	9	Ada	Melakukan seleksi pemilihan penyedia jasa yang kompeten serta resume pekerjaan	Memadai	2	3	6
Kerusakan peralatan dan mesin milik kantor	3	3	9	Ada	Mitigasi kerusakan dengan servis secara rutin dan pemilihan penyedia melalui e-Katalog	Memadai	2	3	6
Tidak Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	3	9	Ada	Pengarahan dan Pemantauan Secara Rutin	Memadai	2	2	4
Tidak Tercapainya Kinerja Staf dan Personil	3	3	9	Ada	Optimalisasi Pemeliharaan	Memadai	2	2	4
Kecelakaan kendaraan bermotor	3	3	9	Ada	Pemeliharaan Rutin Jalan dan pemasangan rambu jalan	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Hasil Pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi teknis	3	4	12	Ada	Surat Teguran dan SCM;Pengadaan APD, Memperketat Penggunaan APD;Pengadaan Rambu, Memperketat Pemasangan Rambu	Memadai	3	3	9
Kemacetan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan	3	3	9	Ada	Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Pengaturan Manajemen Lalu Lintas	Memadai	2	3	6
Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban, mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran	3	3	9	Ada	Memaksimalkan potensi SDM yang ada dan pembuatan checklist dalam pengelolaan dokumen	Belum Memadai	2	3	6
Personil kurang memenuhi kualifikasi pekerjaan	3	3	9	Ada	Melakukan seleksi pemilihan penyedia jasa yang kompeten serta resume pekerjaan	Memadai	2	3	6
Kerusakan peralatan dan	3	3	9	Ada	Mitigasi kerusakan	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
mesin milik kantor					dengan servis secara rutin dan pemilihan penyedia melalui e-Katalog				
Kecelakaan kendaraan bermotor	3	3	9	Ada	Pemeliharaan Rutin Jalan dan pemasangan rambu jalan	Memadai	3	2	6
Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	2	5	10	Ada	Melakukan proses pengadaan lewat e-tendering dan e-purchasing ; melakukan pengawasan pekerjaan dengan benar ; melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan teliti ; tertib dalam administrasi proyek	Memadai	2	4	8
Kemacetan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan	3	3	9	Ada	Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Pengaturan Manajemen Lalu Lintas	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban, mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran	3	3	9	Ada	Memaksimalkan potensi SDM yang ada dan pembuatan checklist dalam pengelolaan dokumen	Belum Memadai	3	2	6
Personil kurang memenuhi kualifikasi pekerjaan	3	3	9	Ada	Melakukan seleksi pemilihan penyedia jasa yang kompeten serta resume pekerjaan	Memadai	2	3	6
Kerusakan peralatan dan mesin milik kantor	3	3	9	Ada	Mitigasi kerusakan dengan servis secara rutin dan pemilihan penyedia melalui e-Katalog	Memadai	2	3	6
Kecelakaan kendaraan bermotor	3	3	9	Ada	Pemeliharaan rutin jalan dan pemasangan rambu jalan	Memadai	3	2	6
Putus kontrak	3	4	12	Ada	Background checking penyedia jasa, SCM	Memadai	3	3	9
Kerugian negara	3	4	12	Ada	Melakukan proses pengadaan lewat e-	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					tendering dan e-purchasing ; melakukan pengawasan pekerjaan dengan benar ; melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan teliti ; tertib dalam administrasi proyek				
Kemacetan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan	3	3	9	Ada	Pemasangan rambu lalu lintas, pengaturan manajemen lalu lintas	Memadai	2	3	6
Putus kontrak	3	4	12	Ada	Background checking penyedia jasa, SCM	Memadai	3	3	9
Jembatan dengan NK 3	3	4	12	Ada	Tambal lubang lantai jembatan	Belum Memadai	3	4	12
Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran	3	3	9	Ada	Memaksimalkan potensi SDM yang ada dan pembuatan checklist dalam pengelolaan	Belum Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					dokumen				
Personil kurang memenuhi kualifikasi pekerjaan	3	3	9	Ada	Melakukan seleksi pemilihan penyedia jasa yang kompeten serta resume pekerjaan	Memadai	2	3	6
Kontrak mundur	3	3	9	Ada	Penjadwalan pekerjaan, lembur	Memadai	3	3	9
Kerusakan peralatan dan mesin milik kantor	3	3	9	Ada	Mitigasi kerusakan dengan servis secara rutin dan pemilihan penyedia melalui e-katalog	Memadai	2	3	6
Kecelakaan kendaraan bermotor	3	3	9	Ada	Pemeliharaan Rutin Jalan dan pemasangan rambu jalan	Memadai	3	2	6
Kemacetan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan	3	3	9	Ada	Pemasangan rambu lalu lintas, pengaturan manajemen lalu lintas	Memadai	2	3	6
Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban,	2	2	4	Ada	Memaksimalkan potensi SDM yang ada dan pembuatan	Belum Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran					checklist dalam pengelolaan dokumen				
Personil kurang memenuhi kualifikasi pekerjaan	3	3	9	Ada	Melakukan seleksi pemilihan penyedia jasa yang kompeten serta resume pekerjaan	Memadai	2	3	6
Kerusakan peralatan dan mesin milik kantor	3	3	9	Ada	Mitigasi kerusakan dengan servis secara rutin dan pemilihan penyedia melalui e-katalog	Memadai	2	3	6
Kerusakan peralatan kebinamargaan dan pemeliharaan rutin	4	3	12	Ada	Mengoptimalkan pemeliharaan rutin dan berkala peralatan dan alat berat	Belum Memadai	4	3	12
Pemalsuan Sertifikat hasil uji	3	3	9	Ada	Sosialisasi keypads masyarakat dan instansi terkait pengecekan keaslian sertifikat	Belum Memadai	3	3	9
Alat-alat laboratorium membutuhkan pembaharuan	2	2	4	Ada	berkoordinasi dengan instansi	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
untuk menunjang pengujian laboratorium yang lebih baik					terkait sebelum melaksanakanpengan daan alat laboratorium yang import (Tidak Masuk TKDN)				
Tidak terlayannya administrasi umum perangkat daerah	3	3	9	Ada	Optimalisasi SDM	Memadai	2	2	4
Tidak Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	3	9	Ada	Optimalisasi Perencanaan ANggaran	Memadai	2	2	4
Tidak Terpenuhinya Barang Milik Daerah yang Terpelihara	3	3	9	Ada	Optimalisasi Perencanaan	Memadai	2	2	4
Gagalnya peserta memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)	3	3	9	Ada	Melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan pembekalan kompetensi teknis bagi para peserta; Melaksanakan pendampingan kepada peserta secara instensif dalam proses pelaksanaan	Belum Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					rangkaian kegiatan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga ahli konstruksi				
Kurang aktifnya pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah oleh administrator daerah	4	2	8	Belum Ada	Melakukan pembinaan pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan pelatihan administrator SIPJAKI rutin	Belum Memadai	4	2	8
Tidak lengkapnya hasil isian form SIMAK Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi oleh objek pengawasan baik Badan Usaha Jasa Konstruksi, pengguna jasa, penyedia jasa maupun pengelola bangunan	2	3	6	Ada	Membuat surat edaran tertulis terkait pengisian form SIMAK Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi;	Belum Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
gedung					Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), penyedia jasa, pengguna jasa dan pengelola bangunan gedung dalam pengisian form SIMAK Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				
Keterlambatan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban	3	3	9	Ada	Memaksimalkan potensi SDM yang ada dan pembuatan checklist dalam pengolahan dokumen; Optimalisasi SDM yang ada; peningkatan	Belum Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					komunikasi, koordinasi dan controlling oleh pimpinan				
Personil keamanan dan kebersihan kurang berkompeten	2	3	6	Ada	Melakukan seleksi dan pemilihan penyedia jasa keamanan dan kebersihan yang kredible; juga melakukan cek backgroud pekerja melalui interview	Belum Memadai	2	3	6
Keterlambatan progres pekerjaan rehabilitasi gedung kantor	3	3	9	Ada	Memaksimalkan potensi SDM yang ada; Menyusun usulan penambahan SDM teknis dan pembuatan checklist pengawasan	Belum Memadai	3	3	9

c. Penetapan Risiko Prioritas

Risiko prioritas merupakan risiko yang akan dilakukan tindak pengendalian lebih lanjut. Penetapan risiko prioritas berdasarkan pada skala atau level risiko serta selera risiko yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, dan/atau kategori sedang.

Tabel 3
Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SASARAN				
Ketersediaan infrastruktur jaringan jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan	16	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Pertumbuhan Pusat Ekonomi baru, menyebabkan Lintas Harian Rata-rata melebihi Lalu Lintas diatas rencana dan penyediaan lahan serta kemampuan pendanaan pemerintah daerah yang terbatas	Menghambat kelancaran usaha pekerjaan masyarakat/ tingkat produktivitas tenaga kerja/ yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Rendahnya penyedotan lumpur tinja untuk di olah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	16	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penyedotan lumpur tinja	Pencemaran lingkungan
PROGRAM				
1. Kurangnya dokumen pendukung kepemilikan lahan terkait batas wilayah untuk penyelenggaraan jalan 2. Kurangnya dokumen sekunder terkait perencanaan desain	12	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Belum semua ruas jalan terleger berdasarkan SK Gubernur	1. Timbulnya konflik terkait kepemilikan lahan dengan tanah sekitar 2. Diperlukan tambahan waktu perencanaan desain untuk mendapatkan data sekunder melalui survei lengkap

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Masih terjadinya temuan hasil pengawasan eksternal	12	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Ketidaksesuaian antara dokumen pendukung konsultan dan hasil pemeriksaan auditor	Penilaian kinerja konsultan rendah
Tidak terpenuhinya standar geometrik dan struktur jalan berkeselamatan	25	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Kondisi topografi, kerawanan bencana dan umur rencana konstruksi sudah terlampaui	Rawan terjadi kecelakaan
Tidak terpenuhinya standar geometrik dan struktur jalan berkeselamatan	15	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Kondisi topografi, kerawanan bencana dan umur rencana konstruksi sudah terlampaui	Rawan terjadi kecelakaan
Ketersediaan sumber air baku SPAM Regional tidak kontinyu	12	Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	Penurunan debit sumber air baku SPAM Regional akibat perubahan iklim	Kapasitas produksi air curah SPAM Regional tidak dapat memenuhi permintaan layanan
Pembangunan infrastruktur akses layanan dasar air limbah domestik belum memadai	16	Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	Pembangunan akses layanan dasar air limbah domestik di Kabupaten/Kota belum menjadi prioritas.	Berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat
Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan
Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Kepala Balai	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan
Kondisi permukaan jalan yang cepat rusak	16	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan
Kondisi Permukaan Jalan Cepat Rusak	16	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan
Kondisi Permukaan Jalan Cepat Rusak	16	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Penanganan Tidak Sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan
Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan
Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Kepala BPJ Wilayah Purwodadi	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan tidak nyaman bagi pengguna jalan
Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan
Kerusakan peralatan dan alat berat pemeliharaan rutin	12	Kepala Balai Pengujian Dan Peralatan	Banyaknya peralatan kebinamargaan yang dimiliki sudah lama tahun perolehannya	Kurang optimalnya operasional peralatan dan alat berat dalam melaksanakan pemeliharaan rutin jalan serta menurunnya tingkat kepercayaan eksternal
KEGIATAN				

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ketidaksesuaian spesifikasi material yang di kontrak dengan di lapangan	12	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Kurang teliti dan kurang pengawasan terhadap material	Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis
Ketidaksesuaian volume pekerjaan yang dilaporkan dengan yang terpasang di lapangan	12	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Kurangnya pengawasan saat pekerjaan di lapangan	Kelebihan pembayaran/kerugian negara
Ketidaksesuaian volume pekerjaan yang dilaporkan dengan yang terpasang di lapangan	12	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Kurangnya pengawasan saat pekerjaan di lapangan	Kelebihan pembayaran/kerugian negara
Ketidaksesuaian spesifikasi material yang di kontrak dengan di lapangan	12	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Kurang teliti dan kurang pengawasan terhadap material	Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis
Ketidaksesuaian volume pekerjaan yang dilaporkan dengan yang terpasang di lapangan	12	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Kurangnya pengawasan saat pekerjaan di lapangan	Kelebihan pembayaran/kerugian negara
Ketidaksesuaian volume pekerjaan yang dilaporkan dengan yang terpasang di lapangan	12	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Kurangnya pengawasan saat pekerjaan di lapangan	Kelebihan pembayaran/kerugian negara
Jembatan dengan NK 3	12	Kepala BPJ Wilayah Purwodadi	Keterbatasan anggaran sehingga hanya mampu menangani dengan pemeliharaan rutin, seharusnya dengan rehabilitasi jembatan. Contoh : Lantai Jembatan Pandanarum banyak lubang, penanganan : tambal lubang	Keamanan dan kenyamanan berkendara berkurang

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerusakan peralatan kebinamargaan dan pemeliharaan rutin	12	Kepala Balai Pengujian dan Peralatan	Banyaknya peralatan kebinamargaan yang dimiliki sudah lama tahun perolehannya	Kurang optimalnya operasional peralatan dan alat berat dalam melaksanakan pemeliharaan rutin jalan serta menurunnya tingkat kepercayaan eksternal

a. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Rencana Tindak Pengendalian ini yang menjadi dasar dalam memastikan bahwa perencanaan yang disusun telah berbasis pada risiko. Dipastikan bahwa RTP yang ditetapkan menjadi aktivitas perangkat daerah. Tabel RTP dituangkan dalam Bab III dan IV Renja PD.

Tabel 4
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SASARAN								
Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	Ketersediaan infrastruktur jaringan jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan	16	Pertumbuhan Pusat Ekonomi baru, menyebabkan Lintas Harian Rata-rata melebihi Lalu Lintas diatas rencana dan penyediaan lahan serta kemampuan pendanaan pemerintah daerah yang terbatas	Menghambat kelancaran usaha pekerjaan masyarakat/ tingkat produktivitas tenaga kerja/ yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.	Penentuan skala prioritas penanganan ruas-ruas jalan berdasarkan Pertumbuhan Wilayah, LHR, kondisi Geografis, Kondisi Struktur	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	>15 Tahun

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman	Persentase akses air limbah domestik aman	Rendahnya penyedotan lumpur tinja untuk di olah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	16	Tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penyedotan lumpur tinja	Pencemaran lingkungan	Pembangunan IPLT	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	2 tahun
PROGRAM								
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang dileger	1. Kurangnya dokumen pendukung kepemilikan lahan terkait batas wilayah untuk penyelenggaraan jalan 2. Kurangnya dokumen sekunder terkait	12	Belum semua ruas jalan terleger berdasarkan SK Gubernur	1. Timbulnya konflik terkait kepemilikan lahan dengan tanah sekitar 2. Diperlukan tambahan waktu perencanaan desain untuk mendapatkan data sekunder	Usulan terkait pembuatan serentak serta pemutakhiran leger jalan (prioritas pada daerah batas provinsi)	Kepala Bidang	2025

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		perencanaan desain			melalui survei lengkap			
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	Masih terjadinya temuan hasil pengawasan eksternal	12	Ketidaksesuaian antara dokumen pendukung konsultan dan hasil pemeriksaan auditor	Penilaian kinerja konsultan rendah	Peningkatan kapasitas penyedia jasa dengan workshop/sosialisasi	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	2025
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	Tidak terpenuhinya standar geometrik dan struktur jalan berkeselamatan	25	Kondisi topografi, kerawanan bencana dan umur rencana konstruksi sudah terlampaui	Rawan terjadi kecelakaan	Perbaikan alinyemen vertikal dan peningkatan struktur jalan	Kepala Bidang	1 Tahun Anggaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	Tidak terpenuhinya standar geometrik dan struktur jalan berkeselamatan	15	Kondisi topografi, kerawanan bencana dan umur rencana konstruksi sudah terlampaui	Rawan terjadi kecelakaan	peningkatan struktur jalan	Kepala Bidang	1 Tahun Anggaran
PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase kapasitas yang	Ketersediaan sumber air baku	12	Penurunan debit sumber air baku	Kapasitas produksi air	Koordinasi terkait rencana	Kepala Dinas PU	1 tahun

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	SPAM Regional tidak kontinyu		SPAM Regional akibat perubahan iklim	curah SPAM Regional tidak dapat memenuhi permintaan layanan	Pembangunan tampungan air baku	BMCK	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase akses air limbah domestik layak	Pembangunan infrastruktur akses layanan dasar air limbah domestik belum memadai	16	Pembangunan akses layanan dasar air limbah domestik di Kabupaten/Kota belum menjadi prioritas.	Berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat	Pembangunan sarpras IPAL Komunal untuk dihibahkan kepada kelompok masyarakat	Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	1 tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Meningkatkan peran serta Mas BIMA dalam pengamatan	Kepala Balai	1 Tahun

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Wilayah Tegal					kondisi jalan		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Mengusulkan kegiatan rehabilitasi/pen- ingkatan jalan yang mengalami kerusakan ringan dan rusak berat	Kepala Balai	Sepanjang tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	Kondisi permukaan jalan yang cepat rusak	16	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Meningkatkan peran serta Mas BIMA dalam pengamatan kondisi jalan.	Kepala Balai	1 tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Meningkatkan peran serta MASBIMA dalam pengamatan kondisi jalan	Kepala Balai	1 tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	Kondisi Permukaan Jalan Cepat Rusak	16	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Meningkatkan peran serta MasBIMA dalam pengamatan kondisi jalan	Kepala Balai	1 Tahun

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Kondisi Permukaan Jalan Cepat Rusak	16	Penanganan Tidak Sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	meningkatkan peran serta MAS BIMA dalam pengamatan kondisi jalan	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	1 Tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Meningkatkan peran serta Mas BIMA dalam pengamatan kondisi jalan	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	1 Tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan tidak nyaman bagi pengguna jalan	Meningkatkan peran serta MAS BIMA dalam pengamatan kondisi jalan	Kepala BPJ Wilayah Purwodadi	1 Tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Kondisi permukaan jalan cepat rusak	16	Penanganan tidak sesuai dengan perencanaan teknis	Jalan tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan	meningkatkan peran mas BIMA dalam pengamatan kondisi jalan	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	1 Tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan	Kerusakan peralatan dan alat berat pemeliharaan	12	Banyaknya peralatan kebinamargaan yang dimiliki sudah	Kurang optimalnya operasional peralatan dan	Menentukan Skala prioritas pemeliharaan rutin peralatan	Kepala Balai	1 Tahun

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kebinamargaan	rutin		lama tahun perolehannya	alat berat dalam melaksanakan pemeliharaan rutin jalan serta menurunnya tingkat kepercayaan eksternal	dan alat berat		
KEGIATAN								
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang	Ketidaksesuaian spesifikasi material yang di kontrak dengan di lapangan	12	Kurang teliti dan kurang pengawasan terhadap material	Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis	Memperketat pengecekan material sebelum diterima	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Sepanjang tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang	Ketidaksesuaian volume pekerjaan yang dilaporkan dengan yang terpasang di lapangan	12	Kurangnya pengawasan saat pekerjaan di lapangan	Kelebihan pembayaran/ker ugian negara	Menerapkan SOP pelaksanaan yang sesuai kaidah	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Sepanjang tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam	Ketidaksesuaian volume pekerjaan yang	12	Kurangnya pengawasan saat pekerjaan di	Kelebihan pembayaran/ker ugian negara	Memperketat pengawasan pelaksanaan di	Kepala Balai Pengelolaan Jalan	Sepanjang tahun

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang	dilaporkan dengan yang terpasang di lapangan		lapangan		lapangan	Wilayah Semarang	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang	Ketidaksesuaian spesifikasi material yang di kontrak dengan di lapangan	12	Kurang teliti dan kurang pengawasan terhadap material	Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis	Memperketat pengecekan material sebelum diterima	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Sepanjang tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang	Ketidaksesuaian volume pekerjaan yang dilaporkan dengan yang terpasang di lapangan	12	Kurangnya pengawasan saat pekerjaan di lapangan	Kelebihan pembayaran/kerugian negara	Menerapkan SOP pelaksanaan yang sesuai kaidah	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Sepanjang tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang	Ketidaksesuaian volume pekerjaan yang dilaporkan dengan yang terpasang di lapangan	12	Kurangnya pengawasan saat pekerjaan di lapangan	Kelebihan pembayaran/kerugian negara	Memperketat pengawasan pelaksanaan di lapangan	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Sepanjang tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Panjang Jembatan Provinsi yang	Jembatan dengan NK 3	12	Keterbatasan anggaran sehingga	Keamanan dan kenyamanan	Rehabilitasi jembatan	Kepala BPJ Wilayah	-

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
JALAN	Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi			hanya mampu menangani dengan pemeliharaan rutin, seharusnya dengan rehabilitasi jembatan. Contoh : Lantai Jembatan Pandanarum banyak lubang, penanganan : tambal lubang	berkendara berkurang		Purwodadi	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Tersedia	Kerusakan peralatan kebinamargaan dan pemeliharaan rutin	12	Banyaknya peralatan kebinamargaan yang dimiliki sudah lama tahun perolehannya	Kurang optimalnya operasional peralatan dan alat berat dalam melaksanakan pemeliharaan rutin jalan serta menurunnya tingkat kepercayaan eksternal	Menentukan skala prioritas pemeliharaan rutin peralatan dan alat berat	Kepala Balai	1 Tahun